



**Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa
Tengah**

Skripsi

Disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Wiwin Kurniasih

NIM : 14010115140116

DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2018

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Wiwin Kurniasih
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010115140116
3. Tempat / Tanggal Lahir : Brebes, 27 Maret 1997
4. Jurusan / Program Studi : S1-Ilmu Pemerintahan
5. Alamat : Desa Kalijurang Rt.02/02, Kecamatan Tonjong
Kabupaten Brebes

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) yang saya tulis dengan judul **Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Jawa Tengah**, adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggungjawab.

Semarang, 18 Desember 2018
Pembuat Pernyataan,

Wiwin Kurniasih
NIM.14010115140116

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-Perjuangan) Jawa Tengah**

Nama Penyusun : Wiwin Kurniasih

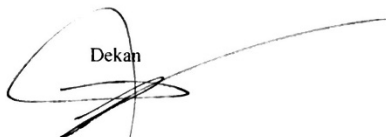
NIM : 14010115140116

Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Ilmu Pemerintahan.

Semarang, 18 Desember 2018

Dekan



Dr. Sunarto, M.Si
NIP. 19660727 199203 1 001

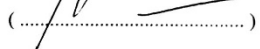
Wakil Dekan I



Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si
NIP. 19610510 198902 1 002

Dosen Pembimbing :

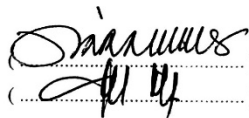

1. Drs. Turtiantoro, M.Si


(.....)

Dosen Penguji Skripsi :

1. Yuwanto, PhD

2. Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si


(.....)

(.....)

HALAMAN MOTTO

Jangan Berhenti Pada Tahap Pemikiran, Do It !!!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas dasar rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah karya intelektual berupa skripsi dengan judul **“Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Jawa Tengah”** ini penulis persembahkan untuk:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan Saudara se-bangsa dan se-tanah air dalam usaha menjaga, mengindahkan dan memajukan Negara.
2. Almamater Universitas Diponegoro, khususnya bagi program studi S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis dalam menambah maupun memperdalam ilmu dan pengetahuan, semoga karya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi program studi, fakultas maupun universitas.
3. Kaum Marhaenis dimanapun Anda berada, dalam skripsi ini terdapat kajian tentang Marhaenisme. Walau sedikit, semoga dapat memberikan pemahaman konseptual maupun praksis tentang apa yang seharusnya Kita lakukan dalam perjuangan.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwito dan Ibu Khumaeroh. Terimakasih atas segala cinta yang diberikan serta segala doa dalam setiap langkah penulis.

5. Adik, Grena Wulanisa dan Lintang Irza Fauziah. Tumbuhlah menjadi pribadi yang menebar kebaikan bagi semua kalangan, bacalah skripsi ini pada waktunya nanti. Terimakasih telah menambah indahny bangunan kasih sayang dalam keluarga.
6. Partner perjuangan serta kekasih, Hardiansyah Hutabarat. Konsep revolusi yang Kita bangun begitu konstruktif, semoga menebar manfaat kepada banyak pihak. Terimakasih atas segala cinta, doa, semangat dan pujian.
Panjang umur semangat perjuangan!
7. Dosen Pembimbing, Drs. Turtiantoro, M.Si. Terimakasih telah menjadi seseorang yang lebih dari dosen pembimbing, menjadi orang tua di Semarang bagi penulis. Atas bimbingan Bapak, semoga karya ini bisa secepatnya penulis kembangkan.
8. Keluarga Besar, terimakasih atas semangat dan dukungan semoga ini menjadi kebanggaan Bersama.
9. Kawan-kawan seperjuangan, terimakasih atas kehidupan indah selama penulis berproses di Semarang semoga saling menebar manfaat.
10. Seluruh kawan penulis disegala lingkungan, terimakasih atas dukunganya.
Sukses untuk Kita.
11. GMNI FISIP Undip, skripsi ini sebagai salah satu langkah penulis dalam usaha mematerialisasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama berproses, semoga pencapaian cita-cita yang telah terumuskan semakin nyata.
MERDEKA!

12. Seluruh Organisasi Intra maupun Ekstra Kampus Universitas Diponegoro, kiranya skripsi ini dapat berguna sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing dari organisasi yang ada.
13. Beberapa orang yang perlu penulis cantumkan namanya disini. Ira Larasati, Anisa Agustina, Alam Sabdani, Furqon Fatchurrahman, Yosef Evan, Randi Yuliandri, Hanifa Maylasari, Khaerul Fatah dan Indra Wahyu. Terimakasih atas segala hal, bergunalah Kalian bagi Nusa dan Bangsa!

Demikian persembahan dalam skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak pihak yang sangat berperan dalam kehidupan penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf jika pihak-pihak yang berperan tidak dapat penulis sebut satu persatu serta mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam karya ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 18 Desember 2018

Wiwin Kurniasih

NIM : 14010115140116

Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang studi orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah. Kajian mengenai hal tersebut dilakukan karena ideologi seringkali tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan, ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi tersebut. Permasalahan lain mengenai ideologi partai adalah menyangkut lemahnya fungsi ideologi dalam kerja partai. Fungsi ideologi sebagai penarik basis masa atau dalam sistem perwakilan dikenal sebagai jembatan antara wakil dan konstituennya tidak optimal. Jawa Tengah dengan julukan *kandang banteng* sebagai satu provinsi yang dapat menggambarkan tentang pelaksanaan penerapan ideologi PDI-P yang mengusung marhaenisme sebagai dasar perjuangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Situs penelitian di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen.

Temuan penelitian yang diperoleh adalah ideologi sebagai dasar perjuangan terbukti diterapkan dalam konsep kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah. Namun orientasi kognitif yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah menyajikan realitas bahwa pemahaman marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya dalam tataran informatif belum pada pelibatan perasaan dan kombinasi nilai dalam tindakan. Akibatnya hambatan datang dari kurangnya pemahaman secara konseptual dan praksis tentang marhaenisme sehingga materialisasi nilai ideologis yang telah terkonep dalam kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan. Sementara itu, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat menuntut DPD PDI-P Jawa Tengah untuk memiliki konsistensi dalam menerjemahkan dasar perjuangan sesuai konteks ruang dan waktu dengan menggunakan perangkat analisis yang tajam. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka saran yang diberikan adalah peningkatan pemahaman kader dan anggota melalui kaderisasi berkesinambungan, penambahan alokasi dana untuk proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi serta materialisasi ideologi sesuai konteks ruang dan waktu.

Kata Kunci: Ideologi, Marhaenisme, Orientasi Ideologi.

Study of the Orientation Ideology Marhaenism in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java.

Abstract

This research explains the Study of the Orientation Ideology Marhaenism in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java. The research was carried out because ideology is often not used as a guideline in policy making, ideology is still seen as something abstract. As a result, internal and external policies are often normative rather than a decrease in ideological values. Other problems regarding party ideology are related to the weak functioning of ideology in party work. The function of ideology as a time-base puller or in a representative system known as a bridge between representatives and its constituents is not optimal. Central Java with the nickname bull cage as a province that can describe the implementation of the PDI-P ideology that carries marhaenism as the basis of the struggle.

This research uses qualitative methods with descriptive research types. The research site in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java with the determination of informants using purposive sampling technique. Sources of data in this study are primary data sources and secondary data sources obtained from data collection techniques in the form of in-depth interviews and document review.

The research findings obtained were ideology as the basis of the struggle proved to be applied in the concept of work of the organization in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java. But the cognitive orientation possessed by cadres and members presents the reality that the understanding of marhaenism as the basis of struggle is only in the informative level yet in the involvement of feelings and combination of values in action. As a result the obstacles come from a lack of conceptual understanding and praxis about marhaenism so that the materialization of ideological values that have been conceptualized in the work of the organization in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java does not work. Meanwhile, the times and rapid technological advances demanded to have consistency in translating the basic struggle in the context of time and space by using sharp analytical tools. Based on the findings of the study, the advice given was to increase the understanding of cadres and members through continuous regeneration, adding funds to the regeneration process and planting ideological values and materializing ideologies in the context of time and space.

Keywords: Ideology, Marhaenism, Ideological Orientation.

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini, pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa ada halangan dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun atas pengalaman pengetahuan dan ilmu yang telah diperoleh penulis dari perkuliahan, organisasi, maupun lingkungan aktualisasi diri lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Sebagai sebuah karya intelektual, skripsi ini disusun dengan konsepsi pemikiran penulis yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan segala kaidahnya tanpa adanya unsur plagiat.

Skripsi dengan judul **Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah** ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai konsep ideologi dan secara spesifik yang berkaitan dengan ideologi partai politik serta konsep pemikiran Sukarno tentang marhaenisme.

Tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua, keluarga besar, dosen pembimbing dan dosen wali yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh dosen Ilmu Pemerintahan dan seluruh civitas akademik FISIP Undip. Demikian juga penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian yakni kepada pihak DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah yang telah

mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh hasil dengan proses yang lancar. Terimakasih juga disampaikan penulis kepada kekasih sebagai *partner* perjuangan dalam berbagai konsep kehidupan dan tentunya kawan-kawan seperjuangan penulis serta semua pihak yang telah membantu serta memberi semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak apabila penulis banyak melakukan kesalahan yang tidak sengaja dan tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Semarang, 18 Desember 2018

Penulis,

Wiwin Kurniasih
NIM: 14010115140116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	14
1.5.1 Penelitian Terdahulu	14
1.5.2 Orientasi Ideologi	16
1.5.3 Ideologi	18
1.5.4 Marhaenisme	20
1.5.5 Ideologi Partai Politik	23
1.6 Operasionalisasi Konsep	26
1.6.1 Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah	26
1.6.2 Orientasi Ideologi	29
1.6.3 Hambatan Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah	30
1.7 Metode Penelitian	31

1.7.1 Desain Penelitian	31
1.7.2 Situs Penelitian	32
1.7.3 Subjek Penelitian.....	33
1.7.4 Jenis Data	34
1.7.5 Sumber Data	34
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	35
1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data	36
1.7.8 Kualitas Data (<i>goodness criteria</i>)	40
BAB II GAMBARAN UMUM	42
2.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	42
2.2 PDI-P Provinsi Jawa Tengah	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
3.1 Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah.....	77
3.1.1 Tinjauan Melalui Fungsi Komunikasi Politik	77
3.1.2 Tinjauan Melalui Fungsi Sosialisasi Politik.....	82
3.1.3 Tinjauan Melalui Fungsi Rekrutmen Politik	87
3.1.4 Tinjauan Melalui Fungsi Pengaturan Konflik	90
3.2 Pemahaman Kader dan Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan	92
3.2.1 Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan.....	92
3.2.2 Sikap dan Perasaan terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan.....	94
3.3.3 Kombinasi Nilai dan Tindakan terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan	96
3.3 Hambatan Penerapan Marhaenisme dalam Kerja Organisasi Partai Politik di DPD PDI-P Jawa Tengah.....	98
3.3.1 Visi dan Misi DPD PDI-P Jawa Tengah	98
3.3.2 Tujuan Antara DPD PDI-P Jawa Tengah	102

3.3.3	Struktur Organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah.....	102
3.3.4	Materialisme Ideologi Politik.....	105
3.4	Tantangan Penerapan Marhaenisme dalam Kerja Organisasi Partai Politik di DPD PDI-P Jawa Tengah.....	114
3.4.1	Tantangan dari Dalam.....	114
3.4.2	Tantangan dari Luar	114
BAB IV PENUTUP		116
4.1	Kesimpulan	116
4.2	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Partai Politik dengan Nilai Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan.....	8
Tabel 2.1 Perolehan Kursi DPR Pemilu 1971.....	50
Tabel 2.2 Struktur DPP PDI-P Periode 2015-2020.....	59
Tabel 2.3 Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah Pemilu 2004, 2009 dan 2014.....	61
Tabel 2.4 Data Struktural PDI-P Jawa Tengah.....	65
Tabel 2.5 Komposisi Pengurus Inti DPD PDI-P Jawa Tengah.....	70
Table 2.6 Daftar Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisis Data Menurut John W. Cresswell.....	40
Gambar 3.1 Bagan Alur Pendidikan Politik Oleh Partai Politik.....	85
Gambar 3.2 Asas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Struktur Pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Surat Ketetapan Partai Nomor : 066/TAP/DPP/XI/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang dan Konferensi Daerah PDI

Lampiran 6. Surat Ketetapan Partai Nomor 067/TAP/DPP/XI/2014 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua PAC, DPC dan DPD PDI-P

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ideologi merupakan suatu gagasan tentang masa depan sekaligus gagasan tentang cita-cita. Istilah ideologi ini dikemukakan oleh filsuf Perancis yang bernama Destutt deTracy (1754-1836) dan muncul sekitar akhir abad ke-18¹. Ideologi dapat dimaknai kedalam dua pengertian yakni sebagai cita-cita dan sebagai masa depan. Ideologi bukan hanya sekedar gagasan, namun ideologi adalah sebuah gagasan yang dianut oleh sekelompok manusia ataupun oleh bangsa dari suatu Negara. Ideologi merupakan alat yang menggerakkan seseorang atau sekelompok orang guna mencapai cita-citanya. Terlepas dari ideologi tersebut hanya sebuah mimpi atau utopia namun penekanannya adalah ideologi merupakan gagasan ilmiah rasional yang bertolak dari analisis masa kini. Gagasan seseorang yang membentuk ideologi tentunya telah memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi di masa depan, namun gagasan mengenai suatu ideologi bukan hanya berpatok pada orientasi mendatang, tetapi melihat realitas yang terjadi pada saat ideologi terbentuk.

¹ Menurut Franz Magnis Suseno, 1992 dalam buku karangan Yulianto Sigit Wibowo, *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), hlm. 56.

Salah satu pemikiran seseorang yang menjelma menjadi sebuah ideologi adalah pemikiran dari Sukarno. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada ideologi hasil pemikiran Sukarno yang menjadi penggerak bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita masa depannya, yakni Marhaenisme.

Sebagai sebuah dasar gerakan politik yang memuat konsep masyarakat yang dikehendaki, maka marhaenisme sudah memenuhi syarat untuk disamakan dengan sebuah ideologi. Sebagai ideologi, maka marhaenisme tidak akan terlepas dari kecenderungan-kecenderungan ideologi lain yang lebih dulu ada. Marhaenisme sebagai ideologi yang progresif merupakan sebuah *counter* ideologi terhadap ideologi reaksioner yang direpresentasikan oleh imperialisme Belanda di Indonesia. Cita-cita marhaenisme bukan hanya sekedar untuk mengusir penjajah Belanda, tetapi yang lebih penting lagi adalah marhaenisme berjuang untuk kesejahteraan rakyat khususnya kaum marhaen Indonesia. Marhaenisme juga berusaha meniadakan sistem yang menindas kaum marhaen itu sendiri contohnya adalah sistem kapitalisme, baik kapitalisme asing maupun kapitalisme bangsa sendiri. Cita-cita ini didasarkan pada kepercayaan marhaenisme, bahwa kapitalisme adalah penyebab kesengsaraan, kemiskinan, peperangan dan rusaknya susunan dunia².

Marhaenisme bertitik tolak dari nasionalisme yang bersifat khas Indonesia yakni sosio-nasionalisme yang dikaitkan dengan perikemanusiaan, dimaksudkan untuk

² Yulianto Sigit Wibowo, *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), hlm.61

menghindari penindasan antar bangsa dan penindasan di dalam bangsa. Sosio-nasionalisme tersebut mendorong sosio-demokrasi yakni demokratisasi yang berkaitan dengan usaha penegakan keadilan sosial³. Singkatnya marhaenisme merupakan cara perjuangan kaum nasionalis untuk membebaskan kaum marhaen dari sistem yang menindasnya. Marhaen sendiri adalah kaum buruh Indonesia, kaum tani Indonesia yang *melarat* dan kaum *melarat* Indonesia yang lainnya. Sedangkan tiap-tiap orang Indonesia yang menjalankan marhaenisme disebut marhaenis⁴.

Marhaenisme disyaratkan menjadi pembebas dan penebus segala kesengsaraan rakyat yang diakibatkan oleh kapitalisme, baik dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. Karenanya marhaenisme secara materiil harus mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara realitas sosial dengan kesadaran aktual massa serta menjelaskan kondisi sosial masyarakat secara historis. Sebab jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka marhaenisme akan terjebak menjadi suatu pemahaman yang tidak ilmiah, sekedar kesadaran palsu dan tidak tertutup kemungkinan menjadi klaim-klaim pembenar kekuasaan.

Segi historis memperlihatkan bahwa ikhtisar marhaenisme telah ada sebagai penggerak dalam dinamika Pergerakan Nasional. Salah satu bagian pergerakan nasional tersebut adalah organisasi partai politik, salah satunya adalah PNI era 1927 yang didirikan Sukarno. Saat itu PNI 1927 belum menganut asas marhaenisme,

³ Retor A.W. Kaligis, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan*, (Tangerang : Margin Kiri, 2014), hlm 312

⁴ Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hlm. 253

melainkan kemerdekaan, persatuan dan solidaritas Indonesia, non-kooperasi serta *self-help*, karena marhaenisme baru pertama kali dinyatakan secara tertulis pada tahun 1930. Namun asas yang dipakai PNI 1927 pada intinya tidak berbeda dengan marhaenisme dan asas tersebut merupakan komponen pendukung lahirnya marhaenisme. Konstelasi politik yang ada sekitar tahun 1930-1931 menghadirkan realita bahwa PNI pada saat itu lesu seiring dengan vonis yang dijatuhkan pengadilan kolonial Bandung pada Sukarno. Ia dijerat pasal 169 Kitab hukum Pidana Kolonial yang berbunyi “*barang siapa ikut dengan perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun, dan barang siapa ikut dengan suatu perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran atau dengan perkumpulan lain yang dilarang peraturan umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.*”⁵ Seiring dengan vonis tersebut, akhirnya pada tanggal 25 April 1931 PNI dinyatakan bubar.

Bubarnya PNI era 1927 tidak mematikan pergerakan nasional yang ada, organisasi partai politik dengan semangat persatuan didirikan kembali pada 29 April 1931 dengan nama Partai Indonesia (Partindo). Asas Partindo adalah menentukan nasib sendiri, persatuan Indonesia, kerakyatan dan kebangsaan. Partindo juga membawa

⁵ Daradjati. *Mr.Sartono : Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2014). Hlm: 2

rumusan tentang marhaen dan proletar yang disampaikan pada kongresnya di Mataram tahun 1930'an. Isi dari putusan dalam kongres tersebut adalah sebagai berikut⁶ :

1. Marhaenisme yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
2. Marhaen, yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lainnya.
3. Partindo memakai perkataan marhaen, dan tidak proletar, karena perkataan proletar sudah termaktub dalam perkataan marhaen dan oleh karena perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.
4. Karena Partindo berkeyakinan bahwa di dalam perjuangan kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya, maka Partindo memakai perkataan marhaen itu.
5. Di dalam perjuangan marhaen itu maka Partindo berkeyakinan bahwa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali.
6. Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan marhaen.
7. Marhaenisme adalah cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.

⁶ Ir. Sukarno. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1*. (Yogyakarta : Media Press Indo dan Yayasan Bung Karno. 2015) hlm. 285-286

8. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.
9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan marhaenisme.

Pada 1936 Partindo dianggap sudah kurang sesuai dengan perkembangan zaman karena semata-mata melakukan konfrontasi kepada pemerintah Belanda tanpa memperhitungkan bahwa Negara jajahan tersebut sedang berhadapan melawan fasisme yang merupakan musuh bersama.

Partindo menorehkan putusan besar yang berguna bagi bangsa Indonesia dalam menentukan langkah gerakannya, yakni tentang Marhaenisme. Marhaenisme kemudian menjadi suatu ideologi penggerak yang diyakini oleh sekelompok orang yang mengakomidir dirinya dalam suatu organisasi partai politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan marhaenisme dijadikan sebagai alat gerak partai tersebut.

Pasca kemerdekaan Indonesia, partai politik yang menggunakan marhaenisme sebagai asasnya adalah PNI yang didirikan pada tahun 1946, meskipun Sukarno sebagai penggagas marhaenisme tidak terlibat dalam PNI era 1946 namun partai tersebut menjadikan marhaenisme sebagai asas yang dipegang karena dinilai sebagai alat perjuangan yang paling baik untuk mengedepankan kesejahteraan kaum marhaen Indonesia.

Dalam era orde baru, terdapat fusi partai tahun 1973 yang menjadikan PNI, MURBA, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik bergabung dalam satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Langkah PDI yang kembali mengangkat marhaenisme sebagai asas nampaknya tidak lancar, konstelasi politik orde baru memaksa istilah marhaenisme tidak dipakai dalam partai tersebut dan de-Sukarnoisasi semakin gencar dilakukan. Namun kalangan PNI cukup cerdas dalam mensiasati bagaimana sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari marhaenisme bisa mereka transformasi ke dalam istilah lain untuk bisa menjadi tiga watak dan ciri PDI, yaitu demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial. PDI juga dalam menunjukkan identitas keberpihakannya terhadap kaum marhaen menggunakan istilah *wong cilik* sebagai pengganti kata marhaen, hal ini yang menjadikan PDI sering disebut sebagai “partainya *wong cilik*”. Berbagai macam konflik internal partai PDI terjadi sampai pada akhirnya pasca orde baru PDI bertransformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P sebagai kelanjutan PDI meneruskan tiga watak dan ciri partai yakni demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial. Perubahan istilah marhaen menjadi istilah *wong cilik* juga dilanjutkan oleh PDI-P⁷.

Aspek sejarah memperlihatkan bahwa PDI-P yang menjadikan marhaenisme sebagai dasar perjuangan tidak bisa terlepas dari aspek sejarah tiga partai sebelumnya, partai-partai tersebut terangkum dalam tabel di bawah ini.

⁷ Retor A.W. Kaligis, Op.Cit, 3

Tabel 1.1

Partai Politik dengan Nilai Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

No.	Nama Partai	Asas
1.	PNI era 1927 – 1931	Kemerdekaan, persatuan dan solidaritas Indonesia, non-kooperasi serta <i>self-help</i> .
2.	PNI era 1946 – 1973	Marhaenisme dengan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi
3.	PDI 1973 – 1998	Asas PDI adalah Pancasila, watak dan ciri partai adalah demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial sebagai Bahasa lain sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari PNI
4.	PDI-P 1998 – sekarang,	PDI-P meneruskan asas, watak dan ciri partai dari PDI yakni Pancasila 1 Juni 1945 sebagai asas, demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial sebagai watak dan ciri partai

PDI-P memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (TRI SILA), serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara (EKA SILA). Selain itu PDI-P merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warganegara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Sukarno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan perjuangan politik. Asas partai PDI-P itu sendiri adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya 1 Juni 1945. Jatidiri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial serta watak partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner⁸. PDI-P masih memakai ajaran Sukarno tentang marhaenisme sebagai dasar dari semangat perjuangannya yang tertuang dalam asas, jatidiri serta watak partai.

Keyakinan dan identitas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen resmi sikap dan kebijakan partai yang menyatakan bahwa PDI-P menyakini bahwa Nasionalisme PDI-P adalah nasionalisme berwatak kerakyatan dan kemanusiaan. Nasionalisme kerakyatan yang digunakan PDI-P adalah nasionalisme Sukarno atau Marhaenisme seperti yang terdapat didalam sikap dan kebijakan PDI-P yang mengatakan bahwa PDI-P memiliki kewajiban sejarah, ideologis dan politis untuk memulihkan nasionalisme kerakyatan (sosio nasionalisme) sebagaimana yang digagas oleh Sukarno agar bisa hidup kembali sebagai bagian utuh dari seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

⁸ AD/ART Partai PDI Perjuangan 2015-2020

Ajaran Sukarno tentang marhaenisme memiliki posisi yang mendasar sebagai dasar perjuangan PDI-P. Inti marhaenisme mengalir dalam nafas gerak PDI-P untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno. Asas partai yang digunakan yakni Pancasila 1 Juni 1945 yang bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (sosio nasionalisme – sosio demokrasi : Marhaenisme) serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi dan berkepribadian di dalam berbudaya (Trisakti).

Permasalahan terkait ideologi partai politik yang sering terjadi adalah seringkali ideologi tersebut tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal partai sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi. Terlebih jika melihat Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai, dimana dalam sistem multi partai, suara partai politik yang didapat di parlemen sulit memenuhi angka 50%+1. Akibatnya partai membutuhkan koalisi dalam parlemen guna memperkuat kedudukan apakah menjadi partai pendukung pemerintah atau partai oposisi. Namun koalisi yang terbentuk memperlihatkan bahwa partai politik dengan ideologi nasionalis berkoalisi dengan partai politik yang berideologi islamis, bahkan tanpa ragu berkoalisi dengan partai politik yang tidak memiliki ideologi sekalipun. Fenomena ini merupakan gambaran tentang hilangnya batas ideologi dalam peta koalisi partai politik.

Permasalahan lain mengenai ideologi partai adalah menyangkut lemahnya fungsi ideologi dalam kerja partai. Fungsi ideologi sebagai penarik basis masa atau dalam sistem perwakilan dikenal sebagai jembatan antara wakil dan konstituennya tidak optimal. Ideologi politik dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan zaman, hal tersebut berkaitan dengan materialisasi ideologi. Konteks ruang dan waktu yang kurang diperhatikan dalam upaya mematerialisasikan ideologi membuat langkah yang ditempuh partai politik sering bias dalam tujuan dan tidak tepat sasaran.

Penelitian ini akan melihat orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah dalam menjalankan roda organisasi partai. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian adalah karena Provinsi Jawa Tengah dijuluki sebagai *Kandang Banteng* lantaran PDI-P merupakan partai yang memiliki banyak pendukung didalamnya. Besarnya dukungan ini terlihat dari hasil tiga kali pelaksanaan Pemilu langsung yakni tahun 2004, 2009 dan 2014 dimana PDI-P Jawa Tengah selalu memperoleh kursi terbanyak di parlemen Jawa Tengah. Selain itu, dapat pula dilihat dari perolehan kursi secara nasional, dimana Jawa Tengah merupakan provinsi dengan perolehan suara PDI-P terbanyak di Indonesia.

PDI-P sebagai partai Sukarnoisme memiliki tugas sejarah memperjuangkan penegakan keadilan sosial ke arah kerja-kerja konkret untuk senantiasa merevitalisasi dan mereaktualisasi marhaenisme sebagai ideologi integratif dan transformatif, hal tersebut dapat dilihat melalui kerja-kerja kongkret kader maupun anggota partai. Jawa

Tengah dengan julukan *kandang banteng* sebagai satu provinsi yang dapat menggambarkan tentang pelaksanaan penerapan ideologi PDI-P yang mengusung marhaenisme sebagai dasar perjuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah?
2. Apakah Kader dan Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah Sudah Memahami Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan?
3. Apa Hambatan dalam Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul “Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah” adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah.

2. Mengetahui pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan.
3. Mengetahui hambatan penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini meliputi dua hal, yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritik

1. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan studi Ilmu Pemerintahan yakni tentang topik ideologi dan partai politik, guna tercapainya pemahaman tentang orientasi ideologi yang dianut oleh partai politik.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan orientasi ideologi, khususnya ideologi marhaenisme di PDI-P.

Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang orientasi ideologi marhaenisme PDI-P, khususnya di DPD PDI-P Jawa Tengah.

2. Sebagai input atau bahan masukan bagi partai politik khususnya PDI-P dalam pbumian ajaran marhaenisme terhadap kadernya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini digunakan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian sebelumnya meliputi konsep yang digunakan, metode penelitian dan hasil penelitian.

Ahmad Hasyemi Multizami (2016), melakukan kajian mengenai marhaenisme dengan meninjau persepsi organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terhadap marhaenisme sebagai ideologi perjuangan. Judul penelitian tersebut adalah : Persepsi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Semarang Terhadap Marhaenisme Sebagai Ideologi Perjuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Di dalamnya penulis berusaha menggambarkan keadaan faktual dan akurat tentang persepsi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Semarang terhadap Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan. Hasil penelitian tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa anggota GMNI cabang Semarang tetap setia memegang teguh ajaran Sukarno yaitu Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan bagi GMNI, dan tetap optimis bahwa

marhaenisme sebagai ideologi perjuangan mampu menjawab tantangan zaman untuk mewujudkan sosialisme Indonesia.

Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani (2013), melakukan penelitian dengan judul : Fungsi Ideologi dalam Partai Politik, Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar ditemukannya fakta-fakta mendalam saat melakukan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan alasan bahwasanya penelitian tersebut hanya dalam batas menggambarkan fungsi ideologi dalam kebijakan dan sikap partai politik. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa UU BPJS adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI-P. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI-P dalam UU BPJS adalah Dasa Prasetiya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu, terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU BPJS. Temuan dalam penelitian membuktikan bahwa PDI-P merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.

1.5.2 Orientasi Ideologi

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi ideologi merupakan kecenderungan seseorang terhadap suatu ideologi tertentu. Orientasi dapat terbentuk melalui adanya proses sosialisasi politik, yang mana sosialisasi politik sendiri berlangsung seumur hidup. Sehingga, orientasi ideologi maupun orientasi politik masing-masing masyarakat dapat berbeda seiring dengan perbedaan pola sosialisasi politik yang mereka alami. Dengan kata lain, akibat proses sosialisasi politik yang berbeda-beda, mengakibatkan orientasi ideologi maupun orientasi politik suatu masyarakat memiliki suatu ciri khas yang mungkin berbeda dengan masyarakat lainnya.

Untuk dapat memahami petunjuk yang relevan mengenai orientasi seseorang terhadap kehidupan politik termasuk di dalamnya tentang orientasi ideologi, haruslah dikumpulkan berbagai informasi yang meliputi pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu obyek pokok orientasi politik. Berdasarkan ketiga keterangan tersebut, maka dapat diperinci orientasi politik ke dalam 3 (tiga) tipe, yaitu⁹:

1. Orientasi Kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap objek-objek politik yang ada di sekitarnya. Individu dalam komunitas sosial hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, pengetahuan mendasar tentang kepercayaan

⁹ Gabriel A Almond dan Sidney Verba. 1984. *BUDAYA POLITIK: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terj. Drs. Sahat Simamora. (Bumi Aksara: Jakarta) hlm. 16

politik, peranan-peranan politik, pemegang peranan politik tersebut dan segala kewajibannya serta input-input dalam sistem politik dan outputnya. Individu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sistem politik bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik, kebijakan terkini, dan sebagainya.

2. Orientasi Afektif, yaitu berbicara mengenai perasaan dan kedekatan individu terhadap suatu sistem politik. Dalam bersikap politik, individu memiliki perasaan mendalam terhadap sistem politik, peranannya, dan aktor politiknya. Apabila individu tersebut memilih simbol parpol sebagai sesuatu yang pasti dan disebabkan oleh pengetahuannya akan simbol-simbol tersebut, maka individu tersebut menggunakan orientasi afektif.

Orientasi afektif memiliki intensitas dan loyalitas yang berbeda yang disebabkan oleh dinamika psikologis individu, seperti kemarahan, rasa benci, rasa bangga, senang maupun frustrasi. Perasaan kecewa akibat tersingkirkan ataupun mengalami penolakan terhadap sistem politik yang ada dapat mengakibatkan individu enggan menanggapi sistem politik yang ada. Demikian pula sebaliknya, pengalaman yang menyenangkan akan mengakibatkan individu terlibat dalam sistem politik yang ada.

3. Orientasi Evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Individu memahami betul program dan perjuangan

partai. Ia juga simpatik dengan ketokohan simbolik partai, yang dengan demikian menyebabkan terlihat aktif dalam perjuangan program partai.

1.5.3 Ideologi

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari “ideo” dan “logi”. Kata “ideo” berasal dari bahasa Yunani yakni *eidos*, dalam bahasa Latin *idea* yang berarti pengertian, ide atau gagasan. Dalam bahasa Jawa dijumpai kata “idep” yang artinya tahu atau melihat, dan kata “logi” dalam bahasa Yunani artinya gagasan, pengertian, kata dan ilmu. Jadi secara epistemologis diterangkan bahwa ideologi merupakan pengetahuan tentang ide (*science of ideas*). Ideologi ini merupakan istilah yang lahir pada abad ke-18, pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy (1754-1836) yang mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang ide. Ilmu pengetahuan ini mempunyai garapan pada upaya penetapan asal mulanya ide-ide, dalam hal ini ilmu pengetahuan tersebut harus mengesampingkan prasangka-prasangka metafisika dan agama. Kemajuan ilmiah hanya dapat dicapai jika ide-ide palsu dapat dihindari. Sampai tingkat ini teori Bacon tentang elemen-elemen yang tidak rasional yang menjadi penghalang dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang dituliskannya dalam *Novum Organum* (1620) dan khususnya perjuangan *Cindillac* melawan prasangka, mempunyai pengaruh yang pasti terhadap ilmu

pengetahuan de Tracy tentang ide-ide. Demikianlah konsepsi awal ide-ide Destutt de Tracy yang mendudukan ideologi sekedar sebagai ilmu pengetahuan¹⁰.

Ideologi bukan hanya sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok manusia maupun bangsa, sehingga ideologi bersifat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa disebut ideologi apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan dengan aksi-aksi yang berkesinambungan. Ideologi memiliki fungsi menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu sendiri. Maka ideologi merupakan sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para penganutnya. Ideologi sebagai pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup tetapi sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Dengan melaksanakan ideologi manusia tidak hanya sekedar melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban, tetapi dengan ideologi pula manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaanya sebagai cita-cita maka tidak mengherankan jika ideologi menjadi bentuk hidup.

¹⁰ Wibowo S Yulianto. 2005. *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Soekarno*. Yogyakarta:Buana Pustaka.

1.5.4 Marhaenisme

Marhaenisme merupakan sebuah ideologi perjuangan yang mengangkat masalah penghisapan dan penindasan rakyat kecil yang terdiri dari kaum tani miskin, petani kecil, buruh miskin, pedagang kecil dan kaum melarat Indonesia lainnya yang dilakukan oleh kapitalis, tuan tanah, rentenir dan golongan-golongan penghisap lainnya. Ungkapan yang paling terkenal dan sering dipakai oleh Sukarno adalah *exploitation de l'homme par l'homme* (penghisapan manusia oleh manusia). Marhaenisme telah dilahirkan dan dikembangkan antara tahun 1930-1933 merupakan pemikiran-pemikiran kiri yang mengambil beberapa saripati Marxisme. Dalam konteks sejarah, marhaenisme merupakan konstruksi pemikiran Sukarno yang dihasilkan dari sebuah perenungan yang sangat mendalam dan sebuah analisa berdasarkan historis materialisme terhadap perkembangan masyarakat yang hidup dalam wilayah geo politik (Hindia-Belanda). Berdasarkan analisa tersebut, didapat realitas sejarah bahwa rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat mendalam akibat sistem kapitalisme bangsa asing dan feodalisme bangsa sendiri.

Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan adalah bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme/imperialisme/kolonialisme yang bersifat menindas rakyat Indonesia. Ketertindasan ini oleh Sukarno dicontohkan dalam realitas kehidupan yang dialami Pak Marhaen. Dia digambarkan sebagai seorang petani miskin dari daerah Cigalereng-Bandung yang kebetulan bertemu Sukarno saat bergerilya ke desa-desa. Dari obrolan antara Sukarno dan Pak Marhaen didapat keterangan bahwa

meskipun Pak Marhaen memiliki sawah dan alat produksi sendiri namun hasil produksi pertaniannya ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, walaupun cukup itu hanya secara pas-pasan. Sukarno berfikir bahwa diperlukan sebuah landasan perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan yang menyengsarakan rakyat. Landasan perjuangan tersebut oleh Sukarno dirumuskan dalam nama Marhaenisme¹¹. Jadi marhaenisme dalam pemikiran Sukarno adalah sebagai ideologi perjuangan dan ideologi pembebasan.

Dari realitas sosial politik yang dilihat Sukarno tersebut maka tanpa melakukan perlawanan terhadap sistem kapitalisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme maka tidak mungkin membebaskan anak manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Dari uraian di atas jelaslah bahwa marhaenisme memiliki keperpihakan yang sangat besar terhadap kaum tertindas (marhaen). Marhaenisme adalah cermin dari jiwa dan cita-cita kehidupan rakyat Indonesia yang merdeka. Bahkan marhaenisme adalah cermin dari jiwa dan cita-cita kehidupan manusia. Sebab pada prinsipnya ajaran marhaenisme itu bersumber dari tuntutan budi dan nurani manusia (*the sosial conscience of man*) yaitu tuntutan atau keinginan untuk terciptanya harmonisasi antara kemerdekaan individu dan keadilan sosial. Begitu pula bagi rakyat Indonesia yang menginginkan

¹¹ Cindy Adams. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. (Yogyakarta : Media Pressindo). Hlm.75

kemerdekaan sebagai sebuah negara bangsa yang di dalam segalanya menyelamatkan kaum marhaen dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Marhaenisme sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi karena telah memenuhi kaidah-kaidah ideologi yang disebutkan pada penjelasan konseptual mengenai ideologi. Marhaenisme merupakan gagasan yang lahir dari pemikiran Sukarno kemudian dianut dan diyakini sekelompok manusia yakni bangsa Indonesia. Gagasan mengenai marhaenisme merupakan intisari dari ideologi bangsa yakni Pancasila 1 Juni 1945. Dimana lima butir Pancasila sebagai dasar negara jika diperas kembali menjadi tiga butir dasar negara yakni Sosio-Nasionalisme yang mencakup butir kebangsaan dan internasionalisme, Sosio-Demokrasi yang mencakup butir musyawarah mufakat dan keadilan social serta Ketuhanan YME. Yang mencakup butir sila Ketuhanan. Lebih spesifik lagi tiga rumusan tersebut dapat diperas kedalam satu rumusan yakni Gotong Royong. Konsep tersebut merupakan konsep mengenai ideologi marhaenisme.

Marhaenisme juga dikatakan sebagai sebuah ideologi karena memiliki nilai, norma dan kepercayaan. Dimana nilai yang terkandung adalah apa yang diharapkan tentang masyarakat terbebas dari belenggu penindasan baik oleh bangsa asing maupun oleh bangsa sendiri. Norma sendiri terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjadi benteng masyarakat dalam bertindak agar cita-cita orang-orang yang memegang teguh marhaenisme tersebut dapat terealisasikan. Kepercayaan dalam hal ideologi marhaenisme yakni menanamkan keyakinan dan kebenaran tentang

perjuangan kelompok yang berpegang pada marhaenisme dapat mewujudkan cita-cita ideologi tersebut.

1.5.5 Ideologi Partai Politik

Ideologi partai politik merupakan payung organisasi partai politik secara keseluruhan termasuk perilaku-perilaku yang muncul didalamnya. Kekuatan ideologi suatu partai politik dapat juga diukur melalui kejelasan persepsi masyarakat akan nilai dan faham yang menjadi basis perjuangan partai politik yang bersangkutan. Ketika pemahaman masyarakat tinggi akan identitas dan basis perjuangan suatu partai politik, maka dapat dikatakan bahwa ideologi partai politik tersebut kuat. Namun apabila masyarakat hanya mampu melihat ideologi suatu partai politik dengan samar-samar dan bahkan bingung dalam mengidentifikasi maksud dan tujuan pendirian partai politik tersebut, maka ideologi partai politik tersebut dapat dikatakan lemah.

Mengingat partai politik merupakan sebuah organisasi maka ideologi partai politik menjadi baik dan kuat jika terdapat konsistensi yang tinggi dari segala elemen organisasi dalam menegakannya. Adapun elemen organisasi penyusun ideologi partai politik tersebut adalah visi dan misi partai, tujuan antara, strategi partai, struktur organisasi partai, budaya organisasi partai, kebijakan partai, kolektivitas ideologi politik, dari ideologi individu ke organisasi, dari sejarah pembentukan ke

perkembangan, dari kebijakan internal ke eksternalisasi, materialisme ideologi politik, *platform* partai, isu politik dan kerangka acuan *problem solving*¹².

Visi dan misi partai politik berkaitan dengan tujuan jangka Panjang serta memberikan gambaran tentang nilai dan faham serta landasan perjuangan partai politik terkait. Dalam hal ini, ideologi berkaitan dengan kondisi ideal masyarakat yang diinginkan. Adapun maksud dari tujuan antara adalah sebagai perantara atau tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan jangka Panjang. Tujuan antara berguna dalam mengukur alur pencapaian tujuan partai politik, selain itu tujuan antara juga berfungsi dalam meninjau pencapaian tujuan partai politik apakah masih dalam jalur ideologisnya atau tidak. Sarana dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan partai politik adalah melalui strategi politik. Strategi tersebut dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu strategi partai politik dalam penggalangan dan mobilisasi massa untuk membentuk opini publik, strategi untuk berkoalisi dengan partai lain dan strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik mulai dari penggalangan dana, pemberdayaan anggota, kaderisasi dan lain sebagainya.

Elemen dari ideologi partai politik berikutnya adalah struktur organisasi. Keterkaitan struktur organisasi dengan ideologi partai politik tercermin dalam cara pengelompokan tugas dan pekerjaan organisasi. Selanjutnya terdapat budaya organisasi, dimana didalamnya semua sistem nilai, kepercayaan dan kerangka berfikir

¹² Firmanzah, Ph.D. 2018. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di era Demokrasi*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Hlm. 111

tercermin dalam perilaku maupun sifat anggota dan pengurus partai politik. Adapun kebijakan partai politik merupakan cara partai politik dalam melihat, menganalisis dan mengajukan solusi atas permasalahan bangsa. Elemen penyusun ideologi partai politik selanjutnya adalah kolektivitas ideologi dimana ideologi partai politik dipandang secara holistik serta menjadi identitas organisasi dan anggota partai secara keseluruhan. Untuk ideologi individu ke dalam ideologi suatu partai perlu terkait dan harus adanya sebuah sistem dan mekanisme yang menjamin kesesuaian tersebut. Ideologi partai dalam wujud materiil perlu juga disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu, itulah yang dimaksud dengan dari sejarah pembentukan harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dalam hal kebijakan internal ke eksternalisasi adalah berkaitan dengan usaha partai membawa ideologinya agar dapat dirasakan pula dampaknya oleh masyarakat luas bukan hanya anggota maupun kader partai yang bersangkutan.

Adapun elemen penyusun selanjutnya adalah materialisme ideologi, hal tersebut dipandang sebagai suatu upaya partai politik untuk menterjemahkan ideologi tersebut kedalam hal-hal yang bersifat riil dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, mengingat ideologi politik biasanya masih bersifat abstrak dan konseptual. Elemen selanjutnya adalah *platform* partai politik yang berisikan komitmen partai politik dalam menjalankan roda organisasi serta berkaitan dengan apa yang ingin dikontribusikan untuk masyarakat. *Platform* partai politik tersebut berisikan hal-hal fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik. Dalam hal isu politik suatu partai

maka berpijak pada permasalahan yang ada di masyarakat dan dalam hal ini kerangka acuan *problem solving* menjadi pijakan partai politik dalam memberikan program penyelesaian atas permasalahan yang ada. Cara partai politik dalam upaya pemecahan permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat tidak akan terlepas dari unsur ideologi, karena ideologi memberikan petunjuk dan arah tentang cara yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Elemen-elemen penyusun ideologi politik tersebut dapat ditinjau dari fungsi partai politik itu sendiri sebagai suatu organisasi. Adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah (1) sebagai sarana komunikasi politik (*instrument of political communication*), (2) sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), (3) sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitment*) dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (*instrument of conflict management*)¹³.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah

Ideologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu gagasan yang dianut oleh sekelompok orang yang terorganisir dalam wadah organisasi partai politik. Partai politik yang dimaksud adalah dalam cangkupan organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah

¹³ Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta : Gramedia Pustaka utama). Hlm.405

dimana ide atau gagasan mengenai ideologi menjadi nilai, norma dan kepercayaan yang dianut oleh setiap kader dan anggota dalam melaksanakan fungsi partai sebagai organisasi politik.

Marhaenisme dalam penelitian ini adalah terkait pemikiran Sukarno mengenai dasar perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan yang menyengsarakan rakyat atau lebih spesifik menyengsarakan kaum marhaen Indonesia. Marhaenisme diadopsi menjadi dasar perjuangan PDI-P. Marhaenisme dalam dasar perjuangan PDI-P merupakan alat perjuangan dalam membentuk dan membangun karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945, sebagai alat perjuangan guna melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai kaidah Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan keTuhanan YME. (Tri Sila) serta sebagai alat perjuangan yang menentang individualisme untuk menghidupkan dan menumbuhkan jiwa semangat Gotong Royong (Eka Sila).

Penelitian ini akan menganalisis penerapan marhaenisme dalam kerja organisasi partai politik di DPD PDI-P Jawa Tengah, dengan melihat penerapan konsep ideologi marhaenisme melalui fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Fungsi partai politik tersebut meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Fenomena yang ingin diamati terkait konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi politik, diamati dari gejala:

- a. Cara DPD PDI-P Jawa Tengah dalam mematerialisasikan aspirasi yang didapat
 - b. Cara DPD PDI-P Jawa Tengah dalam agregasi dan artikulasi kepentingan
2. Sosialisasi politik, diamati dari gejala:
- a. Proses penyampaian nilai marhaenisme agar menjadi budaya organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah
 - b. Media yang digunakan DPD PDI-P Jawa Tengah dalam proses penyampaian nilai marhaenisme
 - c. Siklus kaderisasi yang ditempuh DPD PDI-P Jawa Tengah
3. Rekrutmen politik, diamati dari gejala:
- a. Seleksi kepengurusan internal DPD PDI-P Jawa Tengah
 - b. Seleksi kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah dalam pengisian jabatan eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah
 - c. Penjaringan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah
4. Sarana pengatur konflik, diamati dari gejala:
- a. Proses identifikasi konflik internal maupun eksternal DPD PDI-P Jawa Tengah
 - b. Mekanisme penyelesaian konflik oleh DPD PDI-P Jawa Tengah

1.6.2 Orientasi Ideologi

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari pemikiran seseorang. Orientasi membentuk sistem berfikir orang terkait suatu hal. Penelitian ini akan melihat pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Pemahaman tersebut ditinjau dari orientasi yang dimiliki kader dan anggota yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif.

Orientasi kognitif berkaitan dengan kesadaran serta pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan, orientasi afektif berkaitan dengan perasaan serta sikap kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan, orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian serta tindakan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Fenomena yang akan diamati terkait konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif, diamati dari gejala:
 - a. Pengetahuan kader dan anggota tentang simbol dan kepercayaan mendasar dalam ideologi partai
 - b. Pengetahuan kader dan anggota tentang ideologi, sistem politik yang bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik dan kebijakan terkini
2. Orientasi afektif, diamati dari gejala:

- a. Pelibatan perasaan mendalam kader dan anggota terhadap sistem politik, peranannya, dan aktor politiknya
 - b. Pemahaman kader dan anggota tentang alasan ideologis pengambilan keputusan
3. Orientasi evaluatif, diamati dari gejala:
- a. Adanya kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan pada kader dan anggota
 - b. Pemahaman secara mendalam kader dan anggota tentang dasar perjuangan, tujuan, dan materialisasi dari ideologi yang dimiliki.

1.6.3 Hambatan Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah

Identifikasi hambatan yang ada dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan melihat hambatan tersebut pada setiap elemen penyusun ideologi partai politik sebagai suatu organisasi, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi baru terhadap penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah. Hambatan tersebut akan diamatai dari setiap fenomena mengenai elemen penyusun ideologi politik yang terdiri dari:

1. Visi dan misi
2. Tujuan antara
3. Strategi partai

4. Struktur organisasi
5. Budaya organisasi
6. Kebijakan partai
7. Kolektivitas ideologi politik
8. Ideologi individu ke organisasi
9. Sejarah pembentukan ke perkembangan
10. Kebijakan internal ke eksternalisasi
11. Materialisme ideologi politik
12. *Platform* partai
13. Isu politik
14. Kerangka acuan *problem solving*

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pada penelitian tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah ini, peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu fenomena/peristiwa secara sistematis dan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang dijelaskan demikian diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data maupun temuan lainya selama melakukan penelitian.

Penelitian ini disamping menggunakan tipe penelitian deskriptif juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami (*tounderstand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting yang harus dilakukan seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus kepada tema yang umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel¹⁴.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian berkaitan dengan tempat, instansi maupun wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di DPD PDI-P Jawa Tengah. Situs

¹⁴ Creswell, J. W. (2013). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.4-5

penelitian tersebut dipilih guna memperoleh data yang menunjang terjawabnya rumusan masalah tentang kesesuaian kerja organisasi partai politik di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan ideologi yang dianut, fungsi marhaenisme dan hambatan serta tantangan yang dihadapi DPD PDI-P Jawa Tengah yang mengusung marhaenisme dalam menjalankan organisasi partai.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam teknik penetapan informan penelitian menggunakan *purposive sampling* untuk menjadikan rujukan atau narasumber dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Orang atau instansi terkait paling tahu tentang informasi serta data apa yang diharapkan pada penelitian ini.
2. Orang atau instansi tersebut sebagai penguasa sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah jajaran pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang terdiri dari:

1. Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah
2. Pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah

3. Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah
4. Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) DPD PDI-P Jawa Tengah

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen resmi lainnya, catatan atau memo, dan tindakan-tindakan serta peristiwa-peristiwa dalam kaitannya dengan penelitian tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah.

1.7.5 Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan yakni jajaran pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah selaku subjek penelitian yang terdiri dari ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah, anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang merangkap

anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah dan ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) DPD PDI-P Jawa Tengah

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, baik dari buku, tinjauan pustaka, dokumen-dokumen, jurnal, buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan marhaenisme dalam PDI-P yang diperoleh dari jajaran pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah serta informan lainnya yang menunjang penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Beberapa metode tersebut sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Menanyakan pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara

dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Peneliti akan berhadapan dengan informan secara intens nantinya dalam mendapatkan informasi secara jelas tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Telaah dokumen yang dimaksud bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang tentang kondisi masyarakat dan data yang diambil dari buku, artikel/tulisan ataupun data yang dapat diakses di internet serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Hal-hal yang terdapat dalam analisis data kualitatif merupakan data yang bersifat kata-kata bukan merupakan angka. Data dikumpulkan dengan beraneka ragam cara (wawancara dan dokumen) dan biasanya diolah sebelum siap dituangkan (proses pencatatan, transkrip, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis). Data yang nantinya dianalisis adalah data hasil wawancara dan dokumentasi yang sifatnya kualitatif tentang Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah. Analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan linear dan hierarkis dari John W. Cresswell seperti dalam bukunya *Research Design: Pendekatan*

Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed terbitan Pustaka Pelajar, Yogyakarta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-*scanning* materi, menetik data lapangan ataupun memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama ialah membangun gagasan umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahapan ini penulis akan menulis catatan-catatan khusus tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data

Coding merupakan proses mengelola informasi/materi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum menyimpulkannya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu : mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengelompokkan kata, paragraf ataupun gambar kedalam kategori-kategori.

4. Penerapan proses *coding*

Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan konsep, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Dalam tahapan ini peneliti akan mneyampaikan informasi secara lebih detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam konsep tertentu terkait

dengan topik penelitian. Tahapan ini akan menunjang strategi penelitian yang telah dirancang oleh peneliti.

5. Penyajian atau pelaporan kualitatif

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penyajian atau pelaporan penelitian kualitatif yakni dengan tipe deskriptif.

6. Triangulasi data

Triangulasi data dalam analisis data dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data hasil dari metode pengumpulan data (wawancara dan dokumen) yang dilakukan bersamaan dalam satu tahap penelitian. Kemudian triangulasi dilakukan terhadap *crosscheck* jawaban dari berbagai informan dan juga diperbandingkan fakta atau data yang diperoleh dari lapangan. Membandingkan data hasil dari metode-metode tersebut untuk mengetahui apakah ada hubungan/keterkaitan atau perbedaan-perbedaan. Triangulasi bertujuan untuk menyeimbangkan kekurangan-kekurangan dari satu metode dengan kelebihan-kelebihan dari metode lain.

7. Interpretasi data

Interpretasi yang akan dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif tentang orientasi ideologi Marhaenisme PDI Perjuangan dikalangan pengurus maupun anggota DPD PDI-P Jawa Tengah ini berupa hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data dengan lebih mendalam dan detail melalui persandingan antara hasil temuan dilapangan dengan berbagai macam teori yang telah dijelaskan didalam

kerangka teori dan kerangka konseptual. Dalam interpretasi data, peneliti menggunakan empat macam kriteria untuk memberikan validasi yang akurat terhadap data, empat criteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan fokus dalam pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman dengan menggunakan *membercheck* guna memberikan kesempatan pada partisipan apabila ingin merubah, menambah atau mengurangi jawaban saat wawancara berlangsung.

b. *Dependability* (kebergantungan)

Merupakan kestabilan data dari waktu ke waktu dan pada tiap kondisi. Salah satu teknik untuk mencapai *dependability* data adalah *inquiry audit*, yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang mendukung validasi data. Data-data lain yang mendukung peneliti yaitu mengambil dari teori dan konsep sebelumnya.

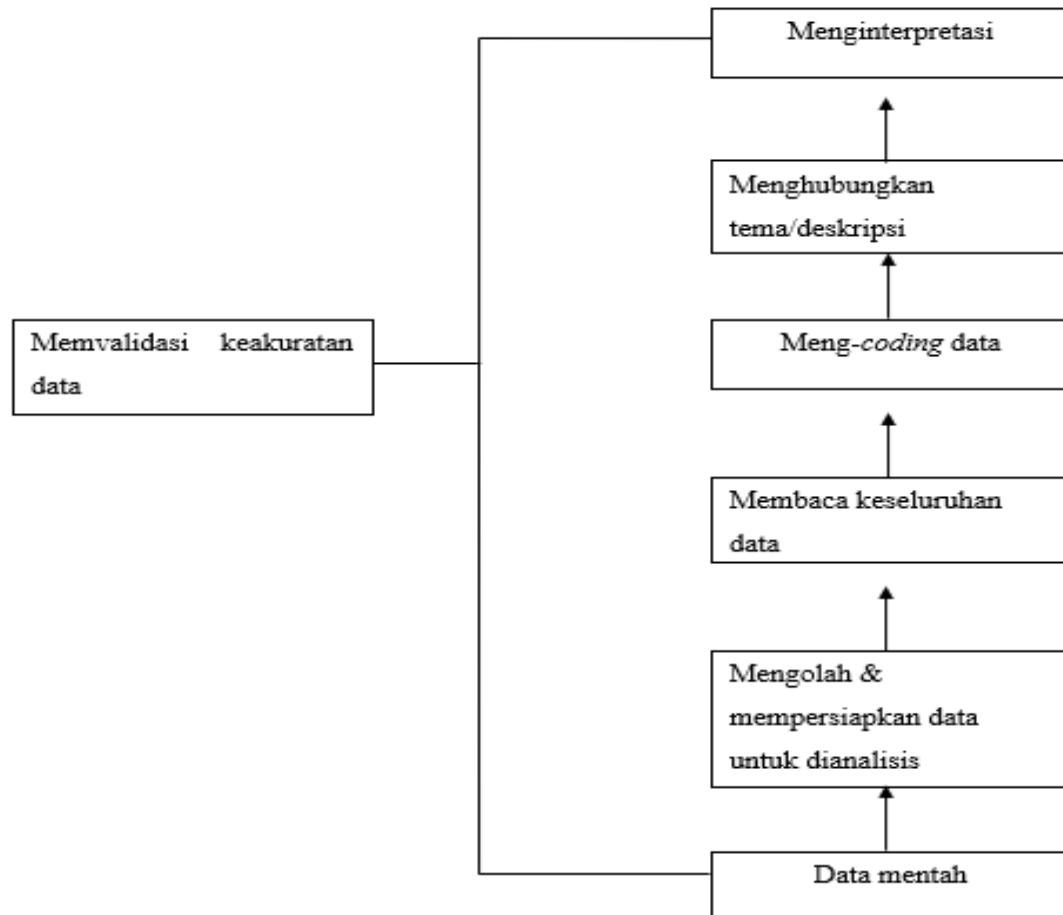
c. *Confirmability*(kepastian)

Merupakan objektivitas atau netralitas data, dimana data yang diperoleh merupakan hasil jawaban yang sama dari partisipan tentang relevansi data.

d. *Transferability* (keteralihan)

Maksudnya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi upaya materialisasi ideologi partai politik..

Gambar 1.1
Analisis Data Menurut John W. Cresswell



1.7.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Keabsahan data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data merupakan kunci utama dan merupakan faktor penentu dari sebuah penelitian, karena apabila sebuah data yang diperoleh diragukan keabsahannya maka penelitian tersebut menjadi

tidak valid. Keabsahan data dapat diperoleh dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik untuk memeriksa keabsahan data untuk pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Peneliti akan membandingkan hasil pengamatan langsung dengan teori yang berlainan dengan yang digunakan dalam penelitian ini sehingga akan menunjang kualitas data hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Jika dirunut ke belakang, PDI-P sebenarnya merupakan partai politik yang memiliki tali kesejarahan dengan partai politik pada masa orde lama. PDI-P sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil dari gagasan fusi partai politik.

Pada 7 Februari 1970, menjelang Pemilu 1971 yang diikuti oleh Sembilan partai politik dan Golongan Karya, Presiden Soeharto melakukan konsultasi kolektif dengan pimpinan Sembilan partai politik tersebut. Dalam konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada aspek material (kelompok material-spiritual) dan kelompok kedua menekankan pada aspek spiritual (kelompok spiritual-material). Keinginan pemerintah untuk melakukan pengelompokan partai menimbulkan perbedaan pendapat diantara elit partai dalam menyikapi gagasan mengenai fusi partai politik tersebut. Para elit partai yang mendukung gagasan tersebut melihatnya sebagai realitas yang memang harus dijalani mengingat konstelasi politik nasional yang terjadi. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966

tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaannya disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaannya yang menuju pada penyederhanaan.

Adapun partai politik yang dikelompokkan dalam golongan material-spiritual terdiri dari partai-partai yang menekankan pembangunan material tanpa mengabaikan aspek spiritual. Partai politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pada tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946, di Kediri, PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau dikenal dengan Serrindo pada waktu itu, yaitu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri. Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri. Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme. PNI merupakan partai pemenang Pemilu dalam Pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,32% atau 57 kursi. Namun pada Pemilu 1971 PNI mengalami penurunan suara dengan hanya memperoleh 6,93% suara atau 20 kursi.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu. Parkindo berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar. Pemilu 1955 Parkindo memperoleh 2,66% suara atau 8 kursi, sementara itu pada Pemilu 1971 Parkindo hanya memperoleh 1,34% suara atau 7 kursi.

3. Partai Katolik

Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1955 Partai Katolik mendapat 2,04% suara atau 6 kursi, sementara itu pada Pemilu 1971 Partai Katolik hanya meraih 1,11% suara sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila,

semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum Pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut Pemilu 1955. Hasil Pemilu 1955 IPKI memperoleh 1,43% suara atau 4 kursi, sedangkan pada Pemilu 1971 hanya mampu memperoleh 0,62 % sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.

5. Murba

Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Menurut data Kementerian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme. Pada Pemilu 1955 Murba memperoleh 0,53% suara atau 2 kursi, namun Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 0,09 % suara.

Kelompok kedua yang terumuskan dalam gagasan fusi adalah kelompok spiritual-material. Kelompok tersebut menekankan pada pembangunan spiritual tanpa

mengabaikan aspek material, partai-partai yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Awal lahirnya NU jika dilihat dari aspek sejarahnya merupakan hasil dari semangat Kebangkitan Nasional sekitar tahun 1908. NU secara resmi lahir sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi pada 31 Januari 1926. NU sebagai sebuah organisasi keagamaan seiring berjalannya waktu mulai berkiprah didunia politik praktis pada tahun 1945 dengan bersama-sama organisasi islam lainnya membentuk partai politik Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). Namun pada 1 Mei 1952 dalam Mukhtamar XIX NU di Palembang, secara resmi NU menyatakan keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik. Hal tersebut dipicu lantaran kekecewaan NU lantaran sikap Masyumi yang tidak lagi menganggap Majlis Syuro sebagai dewan tertinggi dan hanya dijadikan sebagai dewan penasehat serta kekecewaan dalam hal distribusi kekuasaan¹⁵.

Sebagai partai politik NU menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dan berhaluan pada empat madzab dalam islam. NU menjadi kontestan Pemilu 1955 yang memperoleh hasil suara diperingkat ketiga setelah PNI dan Masyumi dengan mendapatkan 18,41% suara atau 45 kursi. Adapun hasil Pemilu 1971

¹⁵ Fuad Abdullah. (2015). *Fusi Partai-partai Islam Menjadi PPP Pada Masa Orde Baru (1971-1973)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

NU menduduki peringkat kedua setelah Golkar dengan memperoleh 18,68% suara atau 58 kursi.

2. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)

Awal kemunculan PERTI adalah di Minangkabau sebagai respon golongan tua terhadap golongan muda yang melakukan gerakan pembaharuan islam dengan tujuan mengubah tradisi terutama gerakan tarekat. Gerakan perubahan yang dilakukan adalah melalui Pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Gerakan yang dilakukan golongan tua lebih berfokus pada Pendidikan dengan mendirikan Lembaga surau termasuk Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Pada 1930 para ulama yang tergabung dalam MTI bersepakat untuk mendirikan suatu wadah organisasi yakni Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat PTI. Namun pada 11 Februari 1938 diperoleh kesepakatan bahwa singkatan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah PERTI. Pada 1944 PERTI bergabung dengan Majelis Islam Tinggi (MIT) yakni organisasi islam untuk seluruh wilayah Sumatera. MIT merupakan wadah untuk meruju berbagai macam persoalan agama namun pada berkembangnya berubah menjadi Masyumi cabang Sumatera. Karena hal tersebut maka PERTI keluar dari MIT yang dianggap sudah tidak berjalan sesuai *khittahnya*, untuk kemudian berdiri sendiri menjadi partai politik PERTI yang disahkan dalam kongresnya pada 24 Desember 1945 di Bukittinggi¹⁶.

¹⁶ Ibid.

PERTI membawa paham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dengan berhaluan pada madzab Imam Syafi'i. Sebagai partai politik PERTI menjadi kontestan Pemilu di Indonesia sebanyak dua kali. Pemilu 1955 memperoleh 1,28% suara yaitu 4 kursi, sedangkan Pemilu 1971 memperoleh 0,69% suara atau sebanyak 2 kursi.

3. Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII)

Nama Sarekat Islam tentunya mewarnai pergerakan nasional, terlebih pada masa kepemimpinan Tjokroaminoto. Berbagai polemik yang terjadi ditubuh SI membuat Tjokroaminoto berkeinginan memperkuat basis organisasi dengan merubahnya ke partai politik. Nuansa disiplin yang rendah dalam konsep sarekat membuatnya berniat mengubah nama sarekat menjadi partai agar meningkatkan disiplin organisasi, selain itu juga bertujuan guna merapatkan barisan menghadapi pemerintah dan PKI. Maka berubahlah SI menjadi PSI (Partai Sarekat Islam). Karena PSI berasaskan islam, maka dinilai tidak dapat mengakomodir konsep nasionalisme dan cinta Tanah Air. Atas dasar hal tersebut maka pada Kongres Nasional PSI ke XIV di Jakarta tahun 1929 PSI memutuskan berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)¹⁷.

Walaupun asas partai tetap islam namun diharapkan dengan pergantian nama tersebut dapat memperluas basis masa partai dengan memasukan unsur

¹⁷ Ibid.

nasionalisme dalam kata Indonesia di dalamnya. Pada Pemilu 1955 PSII memperoleh dukungan sebanyak 2,89% suara yakni mendapat 8 kursi dan pada Pemilu 1971 mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi yakni menjadi 10 kursi dengan total suara sebanyak 2,39%.

4. Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)

Bubarnya Masyumi pada era orde lama tidak membuat tokoh-tokoh partai tersebut diam dan menerima. Semangat para tokoh-tokoh Masyumi melatarbelakangi usaha didirikannya partai politik baru yang dapat melanjutkan konsep yang telah dirumuskan Masyumi. Usaha yang dilakukan para tokoh tersebut adalah dengan membentuk Badan Kordinasi Amal Muslimin (BKAM) pada tahun 1965. Pada 7 Mei 1967 dalam sidang badan tersebut didirikan panitia tujuh yang bertugas melakukan usaha menuju terciptanya partai politik baru¹⁸. Usaha tersebut dilakukan dengan masif dan penuh perjuangan sampai pada akhirnya pemerintah memberikan izin didirikannya partai politik yang dapat menampung aspirasi umat islam khususnya bekas konstituen dari Masyumi namun dengan persyaratan bahwa para mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan penting dalam partai baru yang terbentuk nantinya. Pada 20 Februari 1968 melalui Keputusan Presiden No.70 lahirlah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)¹⁹. Partai tersebut tetap membawa nafas islam sebagai dasar perjuangannya. Selanjutnya PARMUSI menjadi kontestan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Pemilu 1971 dengan memperoleh 5,36% suara dan berhasil mendapatkan 24 kursi parlemen.

Perundingan yang dilakukan Soeharto dengan sembilan partai politik yang disebutkan di atas dilakukan secara massif sebelum dan sesudah Pemilu 1971. Hasil Pemilu 1971 semakin menguatkan banyak pihak untuk menyepakati gagasan tentang pengelompokan partai politik tersebut meskipun pihak yang kontra masih tetap ada. Adapun hasil Pemilu 1971 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perolehan Kursi DPR Pemilu 1971

No.	Nama Partai Politik	%	Jumlah Kursi
1.	Golkar	62,80	227
2.	NU	18,67	58
3.	Parmusi	5,36	24
4.	PNI	6,94	20
5.	PSII	2,39	10
6.	Parkindo	1,34	7
7.	Partai Katolik	1,10	3
8.	Perti	0,70	2
9.	IPKI	0,62	0
10.	Murba	0,09	0
Jumlah		100,00	351

Sumber: Kompas, 9 Agustus 1971. Dalam Widjanarko Puspojo. 2012. Dari Sukarno

Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo. Era Adicitra Intermedia

Hasil Pemilu 1971 tersebut memperlihatkan bahwa Golkar sebagai pendatang baru mampu menyingkirkan partai-partai besar yang sebelumnya menjadi jawara di Pemilu 1955 seperti PNI dan NU. Isu pembangunan yang dibawa oleh Golkar seolah menjadi magnet kuat bagi masyarakat untuk kemudian memilihnya, terlebih disandingkan dengan ketidakmampuan Sembilan partai politik peserta Pemilu 1971 dalam hal *counter* isu pembangunan tersebut. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa trauma masyarakat atas peristiwa G30S juga yang menjadi pendongkrak suara Golkar. Masyarakat tahu bagaimana pemerintah terutama melalui ABRI memperlakukan orang-orang yang dinilai terlibat peristiwa G30S dan Golkar identik dengan pemerintah sehingga masyarakat memiliki ketakutan sendiri jika tidak memilih Golkar. Hal lain yang membuat suara Golkar melambung tinggi adalah dikeluarkannya Permendagri No. 12 Tahun 1970, peraturan tersebut mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk loyal terhadap pemerintah, termasuk didalamnya dalam hal memenangkan Golkar²⁰.

Realitas yang terjadi sebelum maupun sesudah Pemilu 1971 tersebut membuat banyak elit partai politik menyepakati ide mengenai pengelompokan partai yang disampaikan Soeharto sebelum Pemilu berlangsung. Kelompok material-spiritual yang terdiri dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba pada 24 Maret 1970 bersepakat untuk memberikan nama Kelompok Demokrasi Pembangunan dengan

²⁰ Widjanarko Puspoyo. 2012. Dari Sukarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo. Era Adicitra Intermedia. Hlm.119

bentuk Badan Kerjasama²¹. Perbedaan orientasi ideologi yang ada dalam kelompok tersebut diatasi dengan menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pengelompokan. Untuk kelompok spiritual-material yang terdiri dari NU, Perti, PSII dan Parmusi pada 13 Maret 1970 bergabung dalam nama Kelompok Persatuan Pembangunan. Pengelompokan yang dilakukan belum berarti menjadikan partai-partai yang ada sebagai satu kekuatan politik karena masing-masing dari mereka masih memiliki hak kepartaian penuh terlebih masing-masing dari mereka menjadi kontestan Pemilu 1971.

Gagasan mengenai fusi lebih lanjut terealisasi setelah Pemilu 1971. Melalui proses perumusan yang panjang antar tokoh kelima partai politik kelompok material-spiritual, pada 10 Januari 1973 secara resmi lima partai politik yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan melakukan fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Untuk kelompok spiritual-material fusi dideklarasikan kelompok tersebut pada 5 Januari 1973 dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mengingat penelitian ini akan membahas tentang studi orientasi ideologi marhaenisme dalam DPD PDI-P Jawa Tengah, maka pembahasan akan dikerucutkan pada hasil fusi kelompok material-spiritual yakni lebih khusus pembahasan mengenai PDI. Setelah mendeklarasikan diri dalam fusi partai menjadi PDI, di dalamnya terjadi berbagai macam konflik internal partai yang berkepanjangan. Pada masa awal, konflik

²¹ Retor A.W Kaligis. (2014). *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDIP*. Tangerang: Margin Kiri. Hlm.87

yang terjadi adalah konflik ideologis dimana lima partai yang memfusikan diri di dalamnya saling adu argumen mengenai dasar perjuangan, watak maupun ciri partai yang akan dikenakan oleh PDI.

Desukarnoisasi yang terus bergulir pada masa orde baru membuat marhaenisme tidak mungkin dijadikan sebagai asas PDI. Karena hal tersebut identitas keberpihakan partai pada rakyat ditunjukkan melalui istilah *wong cilik* yang sejak akhir 1980 PDI populerkan. Istilah tersebut dipandang cukup aman digunakan dan cukup netral dari unsur PNI serta orde lama. Istilah *wong cilik* dimaknai partai sebagai marhaen, yakni kelas kepemilikan negatif yang mengalami penutupan sosial dengan cara-cara pengucilan berkaitan dengan penggunaan kekuasaan serta mengalami operasi ideologi kelas dominan yang mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan penempatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja murah, sehingga terjadi marjinalisasi ekonomi²². Dalam menjalankan program-programnya PDI terkendala masalah sumber daya manusia. Pada saat itu kaderisasi tidak menjadi prioritas utama dalam organisasi karena terbentur masalah pendanaan dan belum adanya pola kaderisasi yang baku.

Dilihat dari sejarahnya PDI dikenal sebagai partai yang sering berkonflik, konflik yang terjadi didominasi oleh konflik internal partai dimana pada saat itu pihak-pihak yang tidak disukai pemerintah secara otomatis akan tersingkir dari partai. Keterlibatan pemerintah orde baru yang terpusat pada Soeharto mengambil peran yang

²² Retor A.W. Kaligis, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan*, (Tangerang : Margin Kiri, 2014), hlm 300.

sangat berpengaruh pada tubuh PDI. Hal tersebut terlihat dari sikap orde baru yang selalu berperan penting dalam menentukan ketua umum DPP PDI dan mengintervensi melalui forum resmi partai. Dampaknya adalah ketidakmampuan internal PDI menjalankan fungsi kontrol politik menghadapi kekuatan eksternal.

Sentralisme orde baru menemui titik tantangan ketika Megawati tampil sebagai ketua umum PDI. Menjadi sebuah tantangan lantaran Megawati menjadi satu-satunya ketua umum organisasi sosial politik yang terpilih tanpa restu orde baru, hal tersebut terjadi lantaran dukungan terhadap Megawati sendiri tidak dapat dibendung pada akhir tahun 1993. Pemerintah tidak diam melihat hal tersebut terjadi, pemerintah pada tahun 1996 merekayasa adanya kongres dengan menampilkan Soerjadi sebagai ketua umum PDI namun ditolak oleh pendukung Megawati, sehingga terjadi perselisihan arus bawah dan arus atas yang cukup signifikan. Dititik tersebut pemerintah mengambil resiko dengan mendukung pengambilalihan kantor DPP PDI secara paksa dan pada tanggal 27 Juni 1996 untuk pertama kalinya dalam keberjalanan orde baru mengambil jalan kekerasan dan kerusuhan dalam menangani persoalan internal partai politik.

Dukungan dari elemen masyarakat kepada Megawati semakin tak terbendung, hal tersebut lantaran harapan dari masyarakat untuk adanya semangat perlawanan menuju demokrasi yang dinilai terbelenggu oleh orde baru. Mereka bahkan mengabaikan perbedaan kepentingan politik dan ideologi demi tujuan menghadapi kekuasaan pemerintah. Megawati sebagai putri Sukarno dinilai sebagai suatu faktor yang dapat mengubah konstelasi politik dan kepemimpinan nasional orde baru.

PDI pimpinan Megawati melihat bahwasanya pergantian pemimpin harus dilakukan dengan jalan konstitusional. Namun menjelang Pemilu 1999, langkah PDI terhalang karena pada saat itu pemerintahan Habibie masih mengakui PDI pimpinan Soerjadi. Sementara itu UU No. 3 tahun 1999 mengatakan bahwa tidak boleh partai peserta pemilu memiliki nama ataupun lambang yang sama. Karena hal tersebut maka PDI pimpinan Megawati memutuskan untuk menambah kata “Perjuangan” didalamnya, sehingga menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

PDI-P sebagai kelanjutan dari PDI meneruskan tiga watak dan ciri partai yaitu demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial. Pada Pemilu 1999, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Meski demikian, PDI-P gagal membawa Megawati menduduki kursi kepresidenan karena kalah voting dengan Abdurrahman Wahid dalam Sidang Umum MPR 1999. Meski demikian, Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI-P, pengurus DPP PDI-P memutuskan melaksanakan Kongres I PDI-P meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi pascaterpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres I PDI-P

diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah.

Menjelang Kongres I PDI-P, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI-P, nama yang muncul antara lain Dimiyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura. Dalam pandangan umumnya, DPC Kota Jayapura mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimiyati Hartono dan Eros Jarot.

Kongres I PDI-P akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Sebab, sebanyak 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Setelah Kongres I PDI-P tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke-5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI.

Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik PDI-P dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI-P. Meski sebagai partai penguasa, PDI-P ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI-P hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan perolehan 109 kursi di DPR.

Kongres II PDI-P diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005. Menjelang Kongres II PDI-P diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI-P antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat Ketua DPD PDI-P Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophian Sophiaan.

Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu, kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta, salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerakan Pembaruan PDI-P" yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI-P yaitu Guruh Sukarno Putra. Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta *walk out* dari arena sidang. Namun sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk. Ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan kembali.

Kongres II PDI-P akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam

pandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI-P periode 2005-2010.

Dalam kongres III PDI-P tahun 2010, Megawati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2010-2015. Kongres IV PDI-P yang dilaksanakan di Sanur, Bali pada tanggal 9 – 11 April 2015 menempatkan Megawati kembali sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020. Berikut merupakan struktur DPP PDI-P periode 2015-2020 hasil Kongres IV di Bali:

Tabel 2.2
Struktur DPP PDI-P Periode 2015-2020

Jabatan	Nama
Ketua umum	Megawati Soekarnoputri
Ketua Bidang Kehormatan Partai	Komarudin Watubun
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Drs. Bambang Dwi Hartanto
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Idham Samawi
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Politik dan Keamanan	Puan Maharani (non-aktif)
Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundangan	Trimedya Panjaitan
Ketua Bidang Perekonomian	Hendrawan pratikno
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	M. Prakosa
Ketua Bidang Kemaritiman	Rokhim Dahuri
Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Andreas H Pareira
Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan	Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak	Sri Rahayu
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	I Made Urip
Ketua Bidang Koperasi UMKM	Nusirwan Sudjono
Ketua Bidang Pariwisata	Sarwo Budi Yanti
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Syukur Nababan
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	M. Prananda
Sekretaris Jenderal	Hasto Kristiyanto
Wakil Sekretaris Bidang Internal	Utut Adianto
Wakil Sekretaris Bidang Program Kerakyatan	Eriko Sutarduga
Wakil Sekretaris Bidang pemerintahan	Ahmad Basarah
Bendahara Umum	Olly Dodo Kambey
Wakil Bendahara Bidang Internal	Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Program	Juliari Piter Batubara

Sumber: pdi-perjuangan.org

2.2 PDI-P Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 Hektar (Ha) dan terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 573 Kecamatan serta 8.568 desa/kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah dijuluki sebagai *Kandang Banteng* lantaran PDI-P merupakan partai yang memiliki banyak pendukung didalamnya. Besarnya dukungan ini terlihat dari jumlah kursi PDI-P di DPRD Jawa Tengah yang selalu berada diperingkat pertama. Pemilu langsung merupakan perwujudan kongret dari demokrasi, dimana masyarakat tanpa perantara secara sadar memilih wakilnya untuk duduk di parlemen menjadi perhelatan akbar partai politik untuk menunjukkan keberadaanya. Pemilu langsung yang terselenggara pada tahun 2004, 2009 dan 2014 diwilayah Jawa Tengah menyajikan hasil bahwa PDI-P sebagai partai politik masih diakui keberadaanya dengan konsisten menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Jawa Tengah. Hal tersebut juga yang berhasil membuat citra *Kandang Banteng* untuk wilayah Jawa Tengah belum terhapuskan.

Tabel 2.3
Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah Pemilu 2004, 2009 dan 2014

Partai Politik	Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah		
	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
PDI-P	31	23	27
Partai Golkar	18	11	10
PKB	15	9	13
Partai Gerindra	-	9	11
PAN	10	10	8
PPP	10	7	8
Partai Demokrat	9	16	9
PKS	7	10	10
Partai Nasdem	-	-	4
Partai Hanura	-	4	-
PKNU	-	1	-

Sumber: jateng.kpu.go.id

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam Pemilu 2004 PDI-P berhasil menduduki 31 kursi DPRD Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, dimana pada tahun 1999 PDI-P di Jawa Tengah berhasil menduduki 37 kursi namun di 2004 PDI-P tetap memperoleh suara terbanyak dengan nyaris menang di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari total 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah, PDI-P menang di 24 kabupaten dan 4 kota. Sisanya dimenangkan Partai

Golkar (Rembang dan Kota Salatiga), PKB (Tegal, Pekalongan, dan Kudus), dan PPP (Jejara dan Kota Pekalongan).

Dalam Pemilu Legislatif pada 9 April 2009, PDI-P masih menempati posisi teratas di Jawa Tengah meski kembali mengalami penurunan perolehan suara. PDI-P Jateng hanya mampu memperoleh sebanyak 23 kursi di DPRD Jawa Tengah atau memenangkan suara sebanyak 3.305.944 suara dari 26, 2 juta pemilih di sepuluh daerah pemilihan (Dapil). Jumlah ini juga menunjukkan perolehan kursi PDI-P di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak delapan kursi dibandingkan pada Pemilu Legislatif 2004 lalu yang mencapai 31 kursi.

Pada Pemilu 2014 PDI-P unggul di 8 dapil dari keseluruhan total 10 dapil di Jawa Tengah dengan meraih 27 kursi di DPRD Jawa Tengah, sementara untuk total suara yang dikantongi adalah sebanyak 4.295.598 suara. Terjadi kenaikan jumlah perolehan kursi DPRD Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang hanya memperoleh 23 kursi.

Konstelasi peta politik PDI-P menyajikan gambaran yang menarik. Meskipun pada 2004 mengalami penurunan sebanyak 6 kursi namun PDI-P tetap menjadi partai yang paling banyak menduduki kursi DPRD Jawa Tengah. Selain hal tersebut, julukan *Kandang Banteng* pada Jawa Tengah semakin menguat ketika PDI-P selalu memenangkan kadernya yang maju menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. PDI-P Jawa

Tengah berhasil menempatkan Mardiyanto yang berpasangan dengan Ali Mufiz untuk menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng periode 2003 - 2008.

Dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008, PDI-P juga berhasil menempatkan calon yang diusungnya yakni Bibit Waluyo – Rustriningsih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013. Pasangan yang diusung PDI-P tanpa koalisi ini mampu memenangkan Pilgub dengan angka kemenangan mutlak sebesar 43,44 persen atau sebesar 6.048.261 suara dari 26 juta pemilih terdaftar di DPT Pilgub. Pasangan ini berhasil meraih angka penuh mengalahkan empat pasangan lainnya dengan memenangkan pertarungan dalam satu kali putaran.

Pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 PDI-P kembali mengusung kadernya sebagai calon Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo anggota DPR RI fraksi PDI-P berpasangan dengan Heru Sudjatmoko Bupati Purbalingga. Dalam Pilkada tersebut PDI-P tidak berkoalisi dengan partai lain dan dapat memenangkan pasangan Ganjar-Heru dengan perolehan suara sebesar 6.962.417 (48.82%). Pasangan Ganjar-Heru mengalahkan dua calon gubernur lainnya yakni pasangan Hadi Prabowo – Don Murdono yang disusung PKS, Partai Gerindra, PKB, PPP, Hanura PKNU yang memperoleh total suara 20.92% serta mengalahkan pasangan Bibit Waluyo – Sudijono yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN yang mengantongi total suara 30.26%.

Pilkada serentak tahun 2018 PDI-P kembali mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Gubernur Jawa Tengah periode 2018 – 2023. Petahana tersebut didampingi oleh Taj Yasin yang sebelumnya berstatus sebagai anggota komisi E DPRD Jawa Tengah fraksi PPP dari Dapil 3 Jawa Tengah. Pada pilkada serentak tersebut terdapat dua kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, PDI-P berkoalisi dengan PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan partai Golkar untuk mengusung pasangan Ganjar – Taj Yasin yang mendapat nomor urut satu. Sementara itu, pasangan nomor urut dua yakni Sudirman Said selaku mantan Menteri ESDM berpasangan dengan Ida Fauziyah anggota DPR RI fraksi PKB. Pasangan Sudirman – Ida diusung oleh PKB, PKS, PAN dan Partai Gerindra.

Hasil Pemilu resmi yang dikeluarkan oleh KPUD Jawa Tengah pada Pilkada serentak 2018 tersebut menyatakan bahwa Ganjar – Taj Yasin sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemenang Pilkada. Total suara yang dikantongi pasangan Ganjar – Taj Yasin adalah 10.362.694 suara (58.78%) sementara pasangan Sudirman – Ida mengantongi 7.267.993 suara (41.22%) dari total DPT 27.216.491 dengan angka partisipasi sebesar 67.64%.

Secara struktural PDI-P memiliki enam tingkatan yaitu dari DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting. DPD PDI-P mengkoordinir struktural dibawahnya yang terdiri dari DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting serta menjadi jembatan struktural dibawahnya ketinggian pusat yakni DPP PDI-P. Berikut merupakan data struktural dibawah DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.4
Data Struktural PDI-P Jawa Tengah

No.	DPC tiap Kab/Kota	Jumlah		Jumlah	
		Kecamatan	PAC	Desa/kelurahan	Ranting
1.	DPC PDI-P Kab. Cilacap	24	24	284	284
2.	DPC PDI-P Kab. Banyumas	27	27	331	331
3.	DPC PDI-P Kab. Purbalingga	18	18	239	239
4.	DPC PDI-P Kab. Banjarnegara	20	20	278	278
5.	DPC PDI-P Kab. Kebumen	26	26	460	460
6.	DPC PDI-P Kab. Purworejo	16	16	494	494
7.	DPC PDI-P Kab. Wonosobo	15	15	265	265
8.	DPC PDI-P Kab. Magelang	21	21	372	372
9.	DPC PDI-P Kab. Boyolali	19	19	267	267
10.	DPC PDI-P Kab. Klaten	26	26	401	401
11.	DPC PDI-P Kab. Sukoharjo	12	12	167	167
12.	DPC PDI-P Kab. Wonogiri	25	25	294	294
13.	DPC PDI-P Kab. Karanganyar	17	17	177	177
14.	DPC PDI-P Kab. Sragen	20	20	208	208
15.	DPC PDI-P Kab. Grobogan	19	19	280	280
16.	DPC PDI-P Kab. Blora	16	16	295	295
17.	DPC PDI-P Kab. Rembang	14	14	294	294
18.	DPC PDI-P Kab. Pati	21	21	406	406
19.	DPC PDI-P Kab. Kudus	9	9	132	132
20.	DPC PDI-P Kab. Jepara	16	16	195	195
21.	DPC PDI-P Kab. Demak	14	14	249	249
22.	DPC PDI-P Kab. Semarang	19	19	235	235
23.	DPC PDI-P Kab. Temanggung	20	20	289	289
24.	DPC PDI-P Kab. Kendal	20	20	286	286
25.	DPC PDI-P Kab. Batang	15	15	248	248
26.	DPC PDI-P Kab. Pekalongan	19	19	285	285
27.	DPC PDI-P Kab. Pemalang	14	14	222	222
28.	DPC PDI-P Kab. Tegal	18	18	287	287
29.	DPC PDI-P Kab. Brebes	17	17	297	297
30.	DPC PDI-P Kota Magelang	3	3	17	17
31.	DPC PDI-P Kota Surakarta	5	5	51	51
32.	DPC PDI-P Kota Salatiga	4	4	22	22
33.	DPC PDI-P Kota Semarang	16	16	177	177
34.	DPC PDI-P Kota Pekalongan	4	4	47	47
35.	DPC PDI-P Kota Tegal	4	4	4	4

Sumber : Sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah

Data diatas memperlihatkan bahwa PDI-P Jawa Tengah memiliki struktur yang lengkap diseluruh wilayah jenjang administrasi pemerintahan. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC partai berada di 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Pengurus Anak Cabang yang selanjutnya disebut PAC partai ada ditiap wilayah administrasi pemerintah kecamatan yang ada di Jawa Tengah yakni sebanyak 573 wilayah dan Pengurus Ranting yang meliputi wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan tersebar diseluruh desa/kelurahan yang ada di Jawa Tengah yakni sebanyak 8.555 desa/kelurahan. Adapun pengurus anak ranting sudah tersebar ditiap dusun/dukuh/RW/sebutan lainnya ditiap desa. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya PDI-P Jawa Tengah yang secara wilayah struktural dipimpin oleh DPD PDI-P Jawa Tengah telah mengindahkan Pasal 4 Anggaran Dasar Partai PDI-P hasil Kongres IV bahwasanya wilayah partai meliputi seluruh wilayah NKRI yang terstruktur sesuai wilayah jenjang administrasi pemerintahan. Selain itu, terpenuhinya struktur kepengurusan partai ditiap tingkatan administrasi pemerintahan menjadi salah satu elemen pendukung sehat atau tidaknya sebuah organisasi. PDI-P sebagai organisasi partai tidak terlepas dari kaidah kehidupan berorganisasi yang mengharuskan terpenuhinya struktur kepengurusan ditiap wilayah administrasi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah agar alur Kordinasi dan Komunikasi tidak bias serta tercapainya Kolaborasi ditiap tingkatan dalam upaya mencapai tujuan partai.

Secara organisasi, pembentukan struktur pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah melalui mekanisme berjenjang. Adapun forum permusyawaratan sesuai jenjang

kewilayahan dimulai dari Musyawarah Anggota anak Ranting, Musyawarah Ranting (Musyran), Musyawarah Anak Cabang (Musyancab), Konferensi Cabang (Konfercab), Konferensi Daerah (Konferda) dan Kongres. Forum tersebut memiliki wewenang dalam membahas program kerja, pembentukan struktur kepengurusan dan penilaian pertanggungjawaban pengurus.

Ketua DPD PDI Jawa Tengah dipilih dalam forum Konferda dimana nama calon ketua yang ada berdasarkan usulan yang ada di Musyancab dan Konfercab untuk kemudian calon-calon yang diusulkan melakukan tes di DPP PDI-P dan selanjutnya DPP PDI-P mengeluarkan rekomendasi calon ketua DPD PDI-P Jawa Tengah yang nantinya dibahas dalam forum Konferda. Pengambilan keputusan dalam setiap forum partai dilakukan dengan jalan Musyawarah Mufakat, hal tersebut dilakukan sebagai upaya PDI-P dalam mengindahkan konsep demokrasi khususnya Demokrasi Terpimpin hasil pemikiran Sukarno. Upaya tersebut jelas termaktub dalam AD/ART PDI-P Pasal 69 dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah pertama kali terumuskan dalam forum Konferda pada Juli 2000 bertempat di Hotel Patrajasa Semarang. Dalam forum Konferda tersebut seluruh cabang mufakat untuk memilih Mardijo sebagai ketua DPD PDI-P periode 2000-2005. Namun ditengah kepengurusannya dilakukan Konferdasus pada tahun 2003 dan menetapkan Murdoko

sebagai ketua DPD PDI-P Jawa Tengah pengganti Mardijo. Konferdasus tersebut digelar setelah Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah sebelumnya Mardijo dipecat karena tidak mengindahkan instruksi DPP PDI-P dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2003-2008. Mardijo melanggar rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDI-P terkait calon gubernur Jawa Tengah. Rekomendasi tersebut turun untuk Mardiyanto namun Mardijo tetap mencalonkan diri sebagai calon gubernur, pada saat itu tahun 2003 pemilihan gubernur masih melalui parlemen. Pemecatan tersebut dilakukan pada ketua dan sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah yakni Mardijo dan Wuwuh Beno Nugroho selaku pihak yang bertanggungjawab.

Konferda ke-dua dilaksanakan tahun 2005 bertempat di Dimond Convention Hall Solo. Pada saat itu rekomendasi calon ketua DPD PDI-P Jawa Tengah turun untuk tiga orang yaitu Murdoko, Agus Cokro dan G. Rupriatono. Hasilnya adalah cabang-cabang sepakat untuk memilih Murdoko kembali menjadi ketua.

Konferda ke-tiga tahun 2010 yang pada saat itu bertempat di Panti Marhaen membahas kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah untuk periode 2010-2015. Hasilnya adalah cabang diseluruh wilayah Jawa Tengah mufakat untuk memilih Murdoko kembali sebagai ketua. Namun dalam periode ketiga masa kepemimpinannya tepatnya ditahun 2012, Beliau terjerat masalah hukum dari kasus korupsi dana kas daerah Kendal yang dilakukanya dan divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Akibat dari kasus hukum yang menjerat Murdoko maka kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah untuk periode 2010-2015 mengalami tiga kali pergantian pucuk pimpinan. Diawal kepengurusan jabatan ketua dipegang oleh Murdoko. Namun karena tersangkut masalah hukum Murdoko digantikan oleh utusan dari DPP PDI-P yakni salah satu pengurus DPP Muhammad Prakosa sebagai PLH ketua DPD PDI-P Jawa Tengah yang kemudian definitif dan digantikan oleh Heru Sudjatmoko, Bupati Purbalingga tahun 2010-2013 yang kemudian maju sebagai kandidat calon wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI-P mendampingi Ganjar Pranowo di Pilkada tahun 2013.

Konferda ke-empat dilaksanakan pada tahun Juli 2015 dimana Bambang Wuryanto atau lebih akrab dalam panggilan Bambang Pacul terpilih sebagai ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Dalam forum Konferda tersebut terdapat tiga calon ketua yakni Bambang Wuryanto, Agustina Wiludjeng dan ketua periode sebelumnya yakni Heru Sudjatmoko.

Empat kali Konferda yang dilakukan namun terdapat enam kali pergantian kepengurusan inti DPD PDI-P Jawa Tengah lantaran beberapa kasus yang telah disebutkan diatas. Berikut merupakan tabel komposisi pengurus inti DPD PDI-P Jawa Tengah.

Tabel 2.5
Komposisi Pengurus Inti DPD PDI-P Jawa Tengah

Periode	Jabatan		
	Ketua	Sekretaris	Bendahara
2000 – 2003	Mardijo	Wuwuh Beno N.	Supito
2003 – 2005	Murdoko	Maulen Sinaga	Supito
2005 – 2010	Murdoko	Nuniek Sri Y.	Rukma Setyabudi
2010 – 2013	Murdoko	Agustina W.	Rukma Setyabudi
2013 – 2014	M. Prakosa	Agustina W.	Rukma Setyabudi
2014 – 2015	Heru Sudjatmiko	Agustina W.	Rukma Setyabudi
2015 – 2020	Bambang W.	Bambang K.	Agustina W.

Sumber : Sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah

Kepengurusan DPD PDI-P dari tabel diatas memperlihatkan adanya tujuh kali pergantian pengurus dari empat periode kepengurusan. Hal lain yang menarik adalah dalam kepengurusan tersebut beberapa nama mengisi kepengurusan lebih dari satu periode. Hal ini seolah menjadi sebuah paradoks antara kepercayaan pengurus maupun anggota PDI-P Jawa Tengah yang tinggi terhadap orang yang bersangkutan atau justru terjadi krisis kader dalam kepemimpinan organisasi. Menjadi sebuah peluang besar ketika memang kepercayaan terhadap beberapa orang tinggi lantaran kualitasnya menggerakkan PDI-P Jawa Tengah dalam konteks organisasi politik memang baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya kaderisasi yang diterapkan cukup berdampak positif untuk keberjalanan organisasi, namun pada kenyataanya beberapa nama yang

menjabat sebagai pimpinan DPD PDI-P Jawa Tengah justru menanggalkan jabatannya karena suatu pelanggaran aturan dan kasus hukum. Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya Pendidikan ideologis yang diterapkan belum sepenuhnya dijadikan pegangan masing-masing kader dalam bergerak.

Ideologi yang menjadi salah satu nilai tawar yang tinggi bagi PDI-P sudah sepantasnya dipegang teguh oleh masing-masing kader maupun anggota. Penyelewengan tindakan kader dan anggota dalam konteks organisasi maupun ideologi merupakan salah satu *output* dari proses kaderisasi yang dilakukan partai terhadap anggota dan kadernya.

AD/ART PDI-P pasal 87 tentang Kaderisasi Partai secara jelas menyebutkan bahwa kaderisasi berjenjang diterapkan oleh PDI-P. kaderisasi berjenjang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Kader tingkat Pratama, dilaksanakan oleh DPC partai dan melaporkannya pada DPD partai
2. Pendidikan Kader tingkat Madya, dilaksanakan oleh DPD partai dan melaporkannya pada DPP partai
3. Pendidikan Kader tingkat Utama, dilaksanakan oleh DPP partai

DPD PDI-P Jawa Tengah sendiri secara tidak tertulis menerapkan aturan bahwasanya seluruh ketua PAC PDI-P Jawa Tengah minimal telah menempuh Pendidikan Kader tingkat Pratama, begitupun ketua DPC yang harus menempuh

Pendidikan Kader tingkat Madya dan ketua DPD menempuh Pendidikan Kader tingkat Utama. Namun keberjalanannya masih masih terdapat beberapa ketua PAC dan DPC yang belum menempuh proses kaderisasi tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Hariyanto H menuturkan bahwasanya kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah dari awal 2000 sampai saat ini mayoritas diisi oleh kader PDI-P yang telah menempuh kaderisasi berjenjang yang diatur dalam AD/ART partai. Kaderisasi yang ada tidak terlepas dari upaya penanaman nilai-nilai ideologis sesuai dengan ajaran Sukarno untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan berorganisasi dan menjadi *guidance of life* masing-masing kader. Adapun materi kaderisasi yang diatur dalam AD/ART partai adalah sebagai berikut.

Materi pengajaran ideologi yang bersifat utama terdiri dari :

1. Indonesia Menggugat tahun 1930
2. Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1930
3. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945
4. Membangun Dunia Kembali 1960
5. Nawaksara tahun 1966
6. Pidato Ketua Umum

Materi pengajaran ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari :

1. Kapitalisme Bangsa Sendiri tahun 1932
2. Amanat Presiden Sukarno tahun 1959
3. Amanat Presiden Sukarno 1960
4. Deklarasi Ekonomi 1963
5. Marhaenisme adalah Teori Perjuangan tahun 1965

Dari pedoman tentang materi pengajaran ideologi yang tertera diatas cukup kompleks untuk kemudian diresapi dan diterapkan secara praksis oleh para anggota maupun kader PDI-P. Dalam proses penerapan Pendidikan ideologi tersebut, partai memiliki alat kelengkapan berupa Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT). DPD PDI-P memiliki BADIKLAT daerah dengan status alat kelengkapan partai ditingkat daerah yang diorganisir oleh DPD dengan fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota maupun kader partai serta membuat sistem kualifikasi sistem kader.

Nilai-nilai ideologi partai yang dipegang oleh setiap kader maupun anggota tidak hanya berdampak pada organisasi partai yang bersangkutan. Namun terlihat pula pada kebijakan politik penyelenggara negara karena PDI-P sebagai organisasi politik mempunyai tugas untuk memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara. Hal tersebut dilakukan oleh para kader yang berproses di pemerintahan baik pusat maupun daerah dimana memiliki kewenangan dalam hal kebijakan.

Jembatan partai menuju ranah-ranah kebijakan tersebut adalah melalui fraksi yang merupakan salah satu alat kelengkapan partai. Adapun tugas fraksi sebagai alat kelengkapan partai adalah sebagai berikut :

1. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai yang merupakan barisan terdepan dan perpanjangan tangan partai di lembaga legislatif
2. Fraksi bertugas memperjuangkan kebijakan partai di lembaga legislatif agar menjadi kebijakan politik pemerintah
3. Fraksi melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi

Pergantian anggota legislatif partai (pergantian antar waktu) untuk DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPR-RI diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dan harus mendapat persetujuan dari DPP Partai. Adapun fraksi dan pengurus fraksi ditetapkan oleh :

1. DPP partai untuk DPR-RI
2. DPD partai untuk DPRD Provinsi
3. DPC partai untuk DPRD Kabupaten/Kota

Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah terdiri dari para anggota DPRD Jawa Tengah yang diusung PDI-P. Pemilihan umum secara langsung pascareformasi yang dilaksanakan tahun 2004, 2009 dan 2014 telah memberikan kesempatan masyarakat Indonesia untuk dapat memilih secara langsung para wakilnya di parlemen dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

Adapun anggota fraksi PDI-P yang terbentuk pascareformasi hasil dari Pemilu langsung ditahun 2004 berjumlah 31 anggota, 2009 berjumlah 23 anggota dan 2014 berjumlah 27 anggota. Berikut adalah daftar nama anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah.

Table 2.6
Daftar Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah

Masa Bakti 2004-2009	Masa Bakti 2009-2014	Masa Bakti 2014-2019
Murdoko, SH	Murdoko, SH	Dyah Kartika Permana Sari, MM
Drs. Djatmiko Wardoyo, M.Si	Rr. Maria Tri Mangesti, SE	Dede Indra Permana, SH
Drs. Sukimto	Hendrar Prihadi, SE, MM	Rr. Maria Tri Mangesti, SE
Hartati	Yanni Ernawati, SE	Mugiyono
Fatria Rahmadi, S.PI	Ir. Alwin Basri, MM	Ir. Alwin Basri, MM
Drs. HM. Supito, MM	Ayuning Sekar Suci, MA	Sarwono, SE
Drs. Sawidjan	Agus Wardoyo, SE	Ayuning Sekar Suci, MA
Septa Yuhardi	Ir. Joko Purnomo	Ir. Joko Purnomo, MH
Sarwono	Hari Pramono	Untung Wibowo S.
Agustina Wiludjeng P, SS	Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS	Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS
Drs. Kenthut Wahyuni, SH	Budi Indarto, SE	Sumarji
Ir. Herry Sanyoto	Drs, Rukma Setyabudi, MM	Kadarwati, SH, MH
Ir. Agung Guntoro, MT	Peny Dyah P, S.Sos	Sumarsono, S.Sos
Slamet Wiryoatmojo	Bambang Haryanto B.	Ir. Didiek Hardiana P.
Mulyo Wirasmo	Sri Rumiayati, SE, MM	Drs. Rukma Setyabudi, MM
Drs. Daniel Toto, M.Pd	Novita Wijayanti, SE, MM	Peny Dyah P, S.Sos
Drs. Rukma Setyabudi, MM	Samirun, SH, MH	Endrianingsing Yunita, SP
Bambang Raharjo, SP, MM	Asfirla Harisanto, SE	Sri Ruwiyati, SE, MM
Trisnanto Sri Hutomo, S.Pd	Drs. Kartomo, MM	Moch. Ichwan, SH
Wuwuh Beno Nugroho, SH	Sarei Abdul Rosyid, S.IP	Bambang Hariyanto B.
Subandi	Dr. Messy Widiastuti, MARS	Samirun, SH, MH
Bambang Haryanto	Adi Rustanto	Asfirla Harisanto, SE
Widyono, SE	Slamet Efendi, SE	Sarei Abdul Rosyid, S.IP
Novita Wijayanti, SE	Jumlah : 23 anggota	Dr. Messy Widiastuti, MARS
Mustofa S.		Irna Setiawati, SE
Drs. Maulen Sinaga, M.Si		Wahyudi Mas'ud
Sarei Abdul Rosyid, SIP		Ahmad ridwan, SE, MM
Drs. Kartomo, MM		Jumlah : 27 anggota
Tasroni Prayitno Budi		
Dulmanan		
Pujo Widiono		
Jumlah : 31 anggota		

Sumber : Sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah

Mereka yang juga berproses di fraksi PDI-P Jawa Tengah adalah orang-orang yang seharusnya memegang teguh nilai-nilai ideologi partai terlebih rata-rata dari mereka merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Jadi dalam hal ini nilai ideologis akan tercermin dalam setiap tindakan yang diambil masing-masing kader maupun anggota PDI-P Jawa Tengah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah

Analisis penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dilakukan dengan melihat konsep ideologi marhaenisme melalui fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo yang meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah.

3.1.1 Tinjauan Melalui Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Hal tersebut merupakan proses menampung pendapat atau aspirasi dari kelompok atau individu yang kemudian digabungkan dengan pendapat atau aspirasi kelompok maupun individu lain yang senada. Tahap selanjutnya setelah penggabungan kepentingan adalah mengolah kepentingan tersebut kedalam suatu rumusan yang lebih teratur, proses ini dinamakan *interest articulation*. Jadi proses agregasi dan artikulasi pendapat atau aspirasi merupakan salah satu fungsi dari partai politik.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah mengungkapkan bahwasanya dalam hal komunikasi politik, partai berpegang teguh pada Tujuh Fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspirasi

Aspirasi merupakan pendapat mengenai suatu harapan dan cita-cita yang lebih baik dimasa mendatang. Aspirasi sendiri biasanya timbul lantaran adanya keresahan dari individu maupun kelompok terkait fenomena yang dihadapinya untuk kemudian setelah itu individu tau kelompok yang bersangkutan menyampaikan pandangan atau pendapatnya mengenai keadaan yang lebih baik dari apa yang dirasakanya pada saat itu. Partai politik hadir dalam menampung banyaknya aspirasi yang ada di tengah masyarakat.

Menghadapi aspirasi individu maupun kelompok yang beragam dan membawa kepentinganya masing-masing, PDI-P menerapkan skala prioritas dalam penyikapanya. Skala prioritas yang ditetapkan mengacu pada asas yang dipakai oleh PDI-P yaitu mengenai ikhtisar marhaenisme yang tertuang dalam formulasi Pancasila 1 Juni 1945.

“PDI-P Jawa Tengah akan menampung aspirasi dari siapapun dan dari manapun. Namun kita tetap memakai skala prioritas, jika ada yang mengharapkan tentang pembangunan masjid dan pihak lain ada yang mengharapkan tentang pembangunan jembatan penghubung antar desa maka PDI-P akan menempatkan pembangunan jembatan di skala yang pertama dan pembangunan masjid di skala yang kedua. Hal tersebut dilakukan lantaran dalam pandangan PDI-P jembatan penghubung antar desa akan memudahkan mobilisasi warga desa terkhusus kaum marhaen yang ada, dan pembangunan masjid tidak dihapuskan namun ditempatkan pada skala prioritas yang kedua.”²³

Pernyataan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tersebut jelas menggambarkan bahwasanya fokus PDI-P dalam mensejahterakan kaum marhaen menjadi

²³ Wawancara dengan Bambang Wuryanto selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2015-2020. Bertempat di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah. Jum'at 5 Oktober 2018.

titik vital garis perjuangan yang tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun dan sekaligus sebagai penentu skala prioritas langkah politik yang akan diambil.

2. Agregasi

Inti dari proses ini adalah dimana aspirasi yang beragam macamnya kemudian digabungkan kedalam kepentingan-kepentingan yang senada. Proses agregasi kepentingan ini dalam PDI-P Jawa Tengah dilakukan oleh pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah. Didalamnya musyawarah dikedepankan sebagai jalan yang ditempuh dalam proses penggabungan kepentingan.

3. Artikulasi

Setelah aspirasi yang ada melalui proses penggabungan maka selanjutnya aspirasi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur yang muaranya adalah pada usul kebijakan, hal ini merupakan hakikat dari proses artikulasi yang dijalankan partai politik. Menurut ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, aspirasi yang telah terumuskan dalam bentuk kebijakan partai diserahkan sepenuhnya kepada para kader partai yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk materialisme ideologi dimana kebijakan internal partai kemudian dieksternalisasikan menjadi kebijakan pemerintah agar dampaknya bisa secara langsung dan mengikat pada masyarakat Jawa Tengah. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika para kader yang duduk di parlemen Jawa Tengah tidak mengetahui bahwasanya kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan di parlemen adalah materialisme dari ideologi yang dipakai.

“...Saya menjalankan apa yang sekiranya pak ketua perintah, seandainya tidak ada perintah apapun ya kami selaku DPRD kebanyakan hanya menyesuaikan apa yang ada di pusat saja dalam hal peraturan.”²⁴

Jika ditinjau dari orientasi politik yang dimiliki kader, maka orientasi yang ada dalam hal artikulasi kepentingan ini baru sampai ditahap orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap objek-objek politik yang ada di sekitarnya. Individu dalam komunitas sosial hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, pengetahuan mendasar tentang kepercayaan politik, peranan-peranan politik, pemegang peranan politik tersebut dan segala kewajibannya serta input-input dalam sistem politik dan outputnya. Individu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sistem politik bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik, kebijakan terkini, dan sebagainya.

4. Edukasi

Fungsi partai yang keempat ini berkaitan dengan Pendidikan ideologi dan organisasi. Pendidikan tersebut bersifat internal dan eksternal. Menurut ketua DPD PDI-P Jawa Tengah dalam hal ideologi dan organisasi menjadi konsusmsi internal namun partai juga memiliki kewajiban untuk membumikan ajaran partai sesuai apa yang diamanatkan dalam piagam perjuangan partai, maka fungsi edukasi juga ada yang bersifat eksternal.

5. Rekrutmen

²⁴ Wawancara dengan Sarei Abdul Rosyid selaku anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah. Bertempat di Kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah. Senin, 24 September 2018.

Fungsi rekrutmen yang dijalankan PDI-P Jawa Tengah berkaitan dengan suksesi di internal DPD, suksesi kader-kader yang mengisi jabatan pemerintahan dan rekrutmen bagi anggota PDI-P sendiri. Adapun pola rekrutmen yang dijalankan PDI-P Jawa Tengah menurut penuturan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah adalah melalui organ sayap PDI-P Jawa Tengah yang meliputi Parmusi, Repdem dan Taruna Merah Putih.

6. *Electoral*

Fungsi ini tidak terlepas dari tujuan khusus yang dimiliki PDI-P yakni berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional melalui Pemilu sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁵

7. *Budgeting*

Partai menjalankan fungsi anggaran guna memenuhi kebutuhan rumah tangga partai dan kebutuhan lain yang tidak terduga. Adapun menurut ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, anggaran yang didapat DPD PDI-P dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga organisasinya sebagian besar disokong oleh dana iuran pengurus DPD itu sendiri.

²⁵ AD/ART PDI-P Hasil Kongres IV

Dari hasil pemaparan tentang Tujuh Fungsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka yang terdapat tiga poin yang berkaitan erat dengan fungsi komunikasi politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah. Ketiga hal tersebut adalah fungsi aspirasi, fungsi agregasi dan fungsi artikulasi. Penekanan aspek ideologi sangat dijunjung oleh ketua DPD PDI-P namun anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah rata-rata hanya memahami apa yang menjadi instruksi ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa memahami secara mendalam konteks ideologi yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diperjuangkan di ranah legislatif. Sehingga usaha dalam mematerialisasikan ideologi partai ke dalam kebijakan pemerintahan Jawa Tengah belum sepenuhnya berjalan dan perlu proses yang ekstra. Karena partai harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pemahaman anggota fraksi yang minim dalam aspek ideologi dan mereka cenderung hanya berfokus pada pragmatisme politik.

Pragmatisme politik yang dimaksud adalah orientasi anggota fraksi dalam bergerak hanya untuk mempertahankan kursi yang telah didapat di parlemen, terlebih menyongsong Pemilu 2019. Orientasi ideologi dalam hal ini seolah tergeser karena mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak memiliki *urgensitas* yang tinggi.

3.1.2 Tinjauan Melalui Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat difahami sebagai suatu proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap suatu fenomena politik dimana seseorang

tersebut berada. Sosialisasi politik juga dapat difahami sebagai jalan dimana seseorang dapat menyampaikan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena sosialisasi politik merupakan elemen penting bagi terbentuknya budaya politik.

Dalam partai politik, sosialisasi berlangsung seumur hidup dan terkemas dalam proses kaderisasi. PDI-P Jawa Tengah dalam hal kaderisasi memiliki bidang tersendiri yakni Bidang Ideologi dan Kaderisasi yang masuk dalam struktur kepengurusan. Namun terjadi kekosongan lantaran Wakil Ketua bidang yang bersangkutan wafat dan belum ada penggantinya. Untuk itu fungsi ideologi dan kaderisasi penulis tinjau dari badan partai di DPD PDI-P Jawa Tengah yakni BADIKLATDA (Badan Pendidikan dan Pelatihan tingkat Daerah). BADIKLATDA sendiri merupakan badan partai yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pembentukan kader, serta Pendidikan dan Pelatihan kader sesuai penugasan tertentu. Melalui badan partai yang dimiliki DPD PDI-P Jawa Tengah tersebut fungsi sosialisasi politik khususnya melalui jalan Pendidikan politik.

Menurut Harry Fadhilah selaku anggota dari BADIKLATDA menyampaikan bahwasanya:

“Pendidikan politik itu usaha dalam mentransformasikan hal-hal yang berkenaan dengan ideologi partai maupun politik lainnya kepada pengurus, kader dan konstituen supaya sadar terhadap peran, fungsi, hak serta kewajibanya.”²⁶

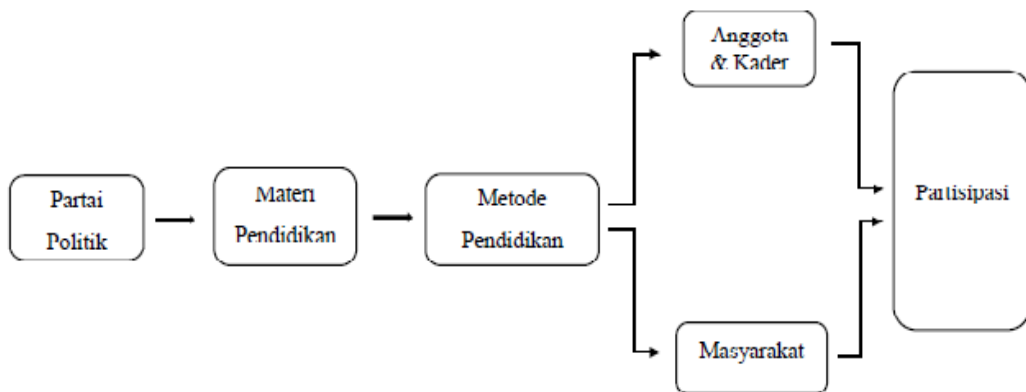
²⁶ Wawancara dengan Harry Fadhilah selaku anggota BADIKLATDA DPD PDI-P Jawa Tengah. Bertempat di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah (Panti Marhaen). Jumat, 5 Oktober 2018.

Hal tersebut senada dengan Pasal 31 UU No 28 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pada setiap partai politik untuk melakukan Pendidikan politik kepada pengurus, kader partai maupun kepada masyarakat.

Menurut pengurus BADIKLATDA DPD PDI-P Jawa Tengah, untuk materi Pendidikan politik yang disampaikan pada masyarakat yakni mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara serta konstelasi yang terjadi. Sedangkan materi Pendidikan politik yang disampaikan kepada kader PDI-P Jawa Tengah yakni lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kader agar berfikir progresif serta tentunya pemantapan ideologi yang dianut. Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pendidikan politik bagi anggota maupun kader bertujuan meningkatkan solidaritas politik dalam rangka memelihara dan menjaga persatuan serta sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan ideologis anggota dan kader.

Gambar 3.1
Bagan Alur Pendidikan Politik Oleh Partai Politik



Berdasarkan bagan yang ada di atas, maka output dari Pendidikan politik yang dilakukan baik di internal partai maupun eksternal adalah adanya partisipasi sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Sesuai dengan AD/ART PDI-P, Pendidikan politik yang dilakukan merupakan komponen dari sistem kaderisasi partai. Sistem kaderisasinya sendiri terbagi dalam kaderisasi partai dan sekolah partai. kaderisasi partai dilakukan secara berjenjang dan terpadu dibawah pengawasan DPP partai. jenjang kaderisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Kader tingkat Pratama, dilaksanakan oleh DPC partai dan melaporkannya pada DPD partai
2. Pendidikan Kader tingkat Madya, dilaksanakan oleh DPD partai dan melaporkannya pada DPP partai

3. Pendidikan Kader tingkat Utama, dilaksanakan oleh DPP partai

Adapun yang dimaksud sekolah partai adalah dibentuk guna melaksanakan Pendidikan politik dan Pendidikan kebangsaan. Tujuan dari sekolah partai yaitu :

1. Membentuk kader partai yang memiliki kesadaran ideologi, organisasi, politik dan kesadaran lingkungan serta pemahaman terhadap aspek social ekonomi kemasyarakatan.
2. Mendidik, mencerdaskan dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa dan negara.
3. Menanamkan ajaran-ajaran Sukarno.

Namun sejauh ini dua metode Pendidikan yang telah dikonsepsikan belum berjalan secara maksimal terutama untuk Pendidikan pada masyarakat secara umum. PDI-P Jawa Tengah lebih banyak memfokuskan pada Pendidikan anggota dan kader, terlebih menyongsong tahun politik 2019 partai lebih sering melakukan Pendidikan politik bagi para calon anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun provinsi.

“silabus kaderisasi telah dibukukan, border untuk masing masing materi jelas didalamnya. Tantangan datang dari dua hal, pertama adalah bagaimana menyesuaikan ideologi yang sifatnya konseptual dengan realita yang ada saat ini. Tantangan kedua adalah mengenai dana. proses Pendidikan politik dalam konteks kaderisasi partai sering terhambat dan bahkan tidak dilaksanakan lantaran keterbatasan dana.”²⁷

²⁷ Ibid

Memateriilkan ideologi partai agar sesuai dengan konsep ruang dan waktu saat ini dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi DPD PDI-P Jawa Tengah dalam penerapannya di materi Pendidikan politik bagi internal partai. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perlu usaha lebih dalam memateriilkan ideologi partai politik. Pemahaman anggota dan kader sejauh inipun masih sebatas pada meyakini bahwa PDI-P adalah partai nasionalis namun tidak mengetahui nasionalis seperti apa yang dibawa oeh partai. tantangan lain adalah datang dari sumber pendanaan bagi Pendidikan politik PDI-P di Jawa Tengah yang terbatas, akibatnya banyak agenda kaderisasi yang terpaksa dilewatkan.

3.1.3 Tinjauan Melalui Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi kepemimpinan karena partai sebagai organisasi politik memiliki peran yang besar dalam mencetak pemimpin yang berkualitas tersebut. Seleksi kepemimpinan yang dilakukan baik untuk internal maupun eksternal partai. Setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas baik dalam sisi ideologi maupun organisasi. Hal tersebut dikarenakan kader yang berkualitas menjadikan partai tidak sulit dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Peluang untuk mengajukan calon dalam kepemimpinan dijabatan pemerintahanpun semakin lebar, baik untuk tingkat daerah maupun nasional.

Selain guna rekrutmen internal dan eksternal, partai politik juga mempunyai kepentingan untuk memperluas atau memperbanyak anggotanya. Sehingga

rekrutmen dapat menjamin kelangsungan hidup bagi partai politik terkait. Anggota yang direkrut kemudian dididik dan ditempa agar menjadi kader yang berkualitas sehingga seleksi kepemimpinan internal dan eksternalpun tidak sulit untuk dilakukan. Adapun salah satu upaya dalam menciptakan kader berkualitas dalam PDI-P adalah melalui Pendidikan politik yang telah disebutkan dipoin pembahasan sebelumnya.

PDI-P Jawa Tengah melakukan rekrutmen untuk memperbanyak anggota melalui sayap-sayap partai yang ada.

“...sejauh ini dalam hal rekrutmen yang paling massif melalui komunitas juang dengan menempa para generasi muda. Sayap partai yang lainnya ada, seperti Repdem, Taruna Merah Putih dan BMI, cuman tidak semasih komunitas juang di Jawa Tengah.”²⁸

Melalui komunitas juang tersebut pementapan ideologi dan organisasi dilakukan, dengan harapan para generasi muda yang ada didalamnya dapat melanjutkan estafet kepemimpinan PDI-P Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah sendiri menurut penuturan Ketua DPD PDI-P, Pendidikan dalam komunitas juang dilakukan dengan sistem *mentoring* oleh masing-masing guru kader, adapun aspek yang dikedepankan adalah pengajaran tentang nilai-nilai ajaran Sukarno serta aspek keorganisasian.

Pendidikan yang dilakukan pada generasi muda yang tergabung dalam komunitas juang harapannya dapat mencetak kader partai yang berkualitas secara ideologi dan kaderisasi, karena menurut pemaparan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah

²⁸ Op.Cit. Hlm.77

kader partai yang saat ini berproses rata-rata mengesampingkan nilai ideologi dan organisasi ketika dibenturkan dengan kepentingan pribadi. Karena angkatan pertama komunitas juang Jawa Tengah dilantik pada tahun 2014 lalu, maka diharapkan untuk sepuluh tahun mendatang PDI-P sudah memiliki kader partai yang ideologis dan organisatoris sehingga rekrutmen internal dan eksternal semakin berkualitas.

Temuan lain yang berhubungan dengan aspek rekrutmen internal organisasi di tubuh DPD PDI-P Jawa Tengah adalah mengenai proses restrukturisasi DPD PDI-P Jawa Tengah tahun 2015. Proses restrukturisasi tersebut diatur dalam Surat Ketetapan Partai Nomor : 066/TAP/DPP/XI/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang dan Konferensi Daerah PDI-P serta Surat Ketetapan Partai Nomor 067/TAP/DPP/XI/2014 tentang Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua PAC, DPC dan DPD PDI-P. Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap mekanisme penjaringan ketua DPD PDI-P melalui forum Konferensi Daerah Jawa Tengah. Keterkaitan aspek ideologi dalam proses restrukturisasi tersebut tercermin dalam mekanisme penjaringan calon ketua DPD dan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam dua Surat Ketetapan Partai yang telah disebutkan di atas. Dalam hal penjaringan calon ketua DPD kriteria yang harus dipenuhi adalah ideologi, pengabdian di partai dan komitmen dalam membangun partai (Pasal 14 Surat Ketetapan Partai Nomor 067/TAP/DPP/XI/2014). Secara praktik aspek ideologi calon ketua DPD dilihat dari serangkaian tes terkait hal-hal ideologi yang harus dilakukan oleh calon ketua, adapun tes tersebut adalah diselenggarakan oleh DPP partai. Aspek lain adalah

mengenai mekanisme pengambilan keputusan, partai mengedepankan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan tidak boleh melakukan voting dalam kondisi apapun (Pasal 24 Surat Keputusan Partai Nomor 066/TAP/DPP/XI/2014). Hal tersebut menegaskan komitmen PDI-P dalam memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.

3.1.4 Tinjauan Melalui Fungsi Pengaturan Konflik

Sejatinya partai politik bukan hanya bergerak untuk internal partainya sendiri, namun adanya partai politik diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat pula. Singkatnya adalah partai diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung psikologis maupun organisasional antara masyarakat dan pemerintahan.

Berbicara tentang konflik maka akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral akan memunculkan banyak kepentingan yang saling berbenturan, hal ini membawa dampak destruktif ketika dibiarkan. Konflik dalam masyarakat tidak bisa dihilangkan tetapi harus dilakukan upaya manajemen konflik supaya konflik yang ada tidak menimbulkan disintegrasi.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Sebelum bertindak dalam penyelesaian konflik yang terjadi, tentunya partai harus mengetahui terlebih dahulu konflik yang ada. PDI-P Jawa Tengah lebih banyak menitikberatkan pada kerja kader-kadernya di parlemen Jawa Tengah dalam hal identifikasi dan pengaturan konflik.

“...urusan itu sepenuhnya nanti diserahkan pada kader-kader di parlemen karena merekakan berasal dari dapil-dapil yang ada di Jawa Tengah jadi diharapkan mampu untuk mengidentifikasinya. Adapun penyelesaiannya nanti dibahas dulu dipartai, setelah itu baru dibawa lagi di meja parlemen. Ya sejalan dengan fungsi aspirasi, agregasi dan artikulasi.”²⁹

Porsi yang lebih besar diberikan pada kader yang ada diparlemen Jawa Tengah membuat proses identifikasi permasalahan kurang maksimal karena rata-rata kader yang duduk diparlemen memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi permasalahan yang harus diprioritaskan PDI-P, tentunya yang sesuai dengan asas perjuangan partai. hal tersebut terjadi lantaran pemahaman ideologi para kader yang ada di parlemen minim. Karena hal tersebut maka upaya partai dalam pengaturan konflik yang ada dimasyarakat kurang maksimal.

²⁹ Op.Cit. Hlm.77

3.2 Pemahaman Kader dan Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

Tujuan dari pembahasan adalah untuk menjelaskan pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan ditinjau dari orientasi yang dimiliki, meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif.

3.2.1 Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

Pembahasan dalam sub bab ini berkaitan dengan orientasi kognitif yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi kognitif berkaitan dengan kesadaran serta pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan.

Pemahaman tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan dimiliki oleh setiap kader dan anggota, dimana masing-masing dari mereka menyadari bahwa nilai marhaenisme merupakan acuan partai menentukan langkah gerak dalam usaha pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Masing-masing kader dan anggota di DPD PDI-P Jawa Tengah memahami bahwa asas partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila 1 Juni 1945 dengan nilai marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila 1 Juni 1945. Intisari tersebut termuat dalam prinsip marhaenisme yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan YME.

Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah meyakini bahwa perjuangan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan *wong cilik*, atau dalam konsep marhaenisme sering disebut dengan kaum marhaen. Menurut hasil rumusan kongres Partindo yang dilaksanakan di Mataram pada tahun 1930, kaum marhaen adalah kaum proletar, tani melarat dan kaum melarat Indonesia lainnya. Jadi perjuangan yang diyakini untuk tercapainya kesejahteraan bagi *wong cilik* adalah sejahteranya rakyat Indonesia yang selama ini tertindas oleh sistem dan hidup dalam garis kemiskinan.

Tidak terdapat perbedaan dalam konteks orientasi kognitif antara kader dan anggota. Status kader dan anggota yang dimiliki oleh individu dalam DPD PDI-P Jawa Tengah dibedakan dari kaderisasi formal yang telah dilaksanakan. Status kader diperoleh ketika anggota telah melaksanakan pendidikan kader tingkat pertama sedangkan status anggota adalah ketika individu masuk dalam rekrutmen awal partai untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Materi yang didapat dalam proses Pendidikan kader tingkat pertama memang lebih banyak dari rekrutmen anggota di awal, namun dalam kader dan anggota keduanya meyakini bahwa perjuangan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan *wong cilik* dan rakyat Indonesia pada umumnya.

“Perjuangan yang dilakukan PDI-P ya untuk membuat para masyarakat Indonesia terutama rakyat miskin untuk hidup dalam kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi pegangan partai.”³⁰

³⁰ Wawancara dengan Bambang Hariyanto Baharudin selaku pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah periode pertama hingga saat ini tahun 2018. Bertempat di Kantor Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah. Senin, 10 September 2018.

“Saya yang duduk di DPRD Jawa Tengah selalu menjalankan perintah ketua untuk mendahulukan kepentingan wong cilik, Saya menjalankan perintah tersebut karena tahu PDI-P berjuang untuk hal itu.”³¹

Pernyataan pertama disampaikan oleh sekretaris fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah dengan status sebagai kader dan pernyataan kedua disampaikan oleh anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah dengan status sebagai anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Keduanya menyampaikan keyakinan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan *wong cilik* merupakan suatu keharusan dan keduanya meyakini bahwa apa yang menjadi dasar perjuangan partai merupakan acuan bergerak dalam upaya pencapaian kesejahteraan tersebut.

Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah mengetahui bahwa marhaenisme tidak tertulis secara eksplisit menjadi ideologi partai namun yang diambil adalah nilai-nilai dari konsep marhaenisme. Ditinjau dari aspek sejarah, hal tersebut terjadi lantaran konstelasi politik pada masa orde baru yang menyajikan realita adanya desukarnoisasi sehingga marhaenisme tidak tertulis secara eksplisit menjadi ideologi partai. Adanya orientasi kognitif menyebabkan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah menyadari bahwa marhaenisme merupakan dasar perjuangan partai.

3.2.2 Sikap dan Perasaan terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

Pembahasan ini berkaitan dengan orientasi afektif, dimana orientasi afektif berkaitan dengan perasaan serta sikap kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah

³¹ Op.Cit. Hlm.78

terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah meyakini dan mendukung upaya pencapaian tujuan partai dengan menggunakan marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Namun dukungan tersebut diwujudkan kader dan anggota dalam bentuk mematuhi perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena mereka meyakini bahwa apapun yang diperintahkan adalah berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam dasar perjuangan partai.

Tinjauan tersebut dilakukan pada kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang menjabat sebagai anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan lantaran kader dan anggota yang duduk di parlemen Jawa Tengah merupakan petugas partai yang banyak diberikan tugas untuk mematerialisasikan apa yang menjadi ideologi partai melalui meja parlemen. Harapannya adalah bentuk kongkret marhaenisme dapat menjangkau secara keseluruhan dan berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Tengah dalam bentuk kebijakan atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif di Jawa Tengah.

“...kami sebagai petugas partai yang duduk di DPRD Jawa Tengah percaya bahwa langkah gerak partai melalui parlemen sudah dikonsepsikan oleh ketua termasuk dalam usaha pengejawantahan marhaenisme. Jadi sudah menjadi tugas kami untuk menjalankan apa yang diperintahkan sebagai bentuk usaha pencapaian tujuan.”³²

³² Op.Cit. Hlm.78

Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk dukungan kader dan anggota terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan tercermin dalam kepatuhan pada segala perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya ikatan emosional yang terbentuk adalah antara kader dan anggota dengan pimpinanya bukan dengan marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Hal yang penting untuk digaris bawahi adalah kader dan anggota memiliki pengetahuan tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya saja ikatan emosional yang terbentuk dalam konteks kerja struktural organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah dimana mereka mematuhi segala perintah ketua.

3.3.3 Kombinasi Nilai dan Tindakan terhadap Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

Pembahasan ini berkaitan dengan orientasi evaluatif yang dimiliki oleh kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Orientasi evaluatif berkaitan dengan keputusan dan pendapat tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan dengan melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi evaluatif berbicara tentang individu yang memahami betul dasar perjuangan partai, mengetahui tindakan dalam konteks materialisasi nilai-nilai perjuangan, mengetahui konteks ruang dan waktu dalam materialisasi nilai perjuangan sehingga yang demikian menyebabkan individu tersebut terlihat aktif dalam perjuangan partai.

Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah hanya sebatas mengetahui bahwa nilai marhaenisme menjadi dasar perjuangan partai. Nilai marhaenisme yang mengalir dalam setiap gerak partai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno tidak diimbangi dengan wujud kongkret nilai tersebut dalam suatu tindakan dari masing-masing kader dan anggota.

Tindakan dalam upaya materialisasi dasar perjuangan lebih banyak dilakukan melalui perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa menelaah lebih dalam konteks perintah yang dijalankan. Hal tersebut membuktikan bahwa orientasi evaluatif belum sepenuhnya dimiliki oleh para kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah.

Orientasi evaluatif mengarah pada materialisasi ideologi sesuai konteks ruang dan waktu, hal ini penting dilakukan lantaran latar belakang lahirnya marhaenisme sebagai dasar perjuangan berbeda dengan latar saat ini. Marhaenisme sebagai seperangkat nilai tidak berubah, namun implementasi kongkret dari nilai tersebut harus menyesuaikan dengan realitas yang terjadi saat ini. Kesadaran kader dan anggota untuk berfikir kearah materialisasi marhaenisme sesuai konteks ruang dan waktu tidak ada karena orientasi yang terbentuk sebatas mereka mengetahui bahwa marhaenisme merupakan dasar perjuangan partai.

3.3 Hambatan Penerapan Marhaenisme dalam Kerja Organisasi Partai Politik di DPD PDI-P Jawa Tengah

Identifikasi hambatan yang ada dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan melihat hambatan tersebut pada setiap elemen penyusun ideologi partai politik sebagai suatu organisasi, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi baru terhadap penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah. Adapun elemen penyusun ideologi partai politik sebagai suatu organisasi yang akan dibahas meliputi visi dan misi, tujuan antara, struktur organisasi serta materialisasi ideologi politik.

3.3.1 Visi dan Misi DPD PDI-P Jawa Tengah

Visi yang dimiliki oleh suatu partai politik merupakan tujuan jangka panjang partai politik terkait. Visi merupakan pernyataan mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai oleh partai politik. Hal tersebut menjadi unsur yang sangat penting karena masyarakat harus diberi gambaran dan kepastian tentang finalisasi perjuangan partai politik. PDI-P sebagai suatu partai politik di Indonesia memiliki visi yang termaktub dalam AD&ART partai, visi tersebut adalah “Mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai NKRI yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Sejalan dengan misi partai yang merupakan alasan mengapa organisasi partai politik itu ada, partai politik secara teoritik didirikan guna memfasilitasi kepentingan politik suatu kelompok masyarakat. Sehingga memberikan kejelasan

institusional atas perjuangan dan aspirasinya, adapun misi yang dimiliki oleh PDI-P itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera, berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
3. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
4. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
5. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

6. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal visi dan misi partai tidak ada perbedaan antar satu wilayah dengan wilayah lainya karena sejatinya antar daerah merupakan satu kesatuan. Masing-masing struktur kepengurusan ditiap daerah yang sifatnya berjenjang dari anak ranting sampai pusat ada sebagai fungsi struktural partai yang memudahkan komunikasi dan alur kordinasi.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah menyampaikan bahwa yang menjadi pembeda adalah visi dan misi masing-masing ketua DPD yang dibawa ditiap kepengurusan. Jadi dalam hal ini berbicara tentang visi misi kepengurusan bukan mengenai visi misi partai politik. Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah dalam kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2015-2020 membawa visi “Jawa Tengah mantap ideologi dan mantap organisasi.” Adapun misi yang dibawa sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang ada menurut penuturan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

“Jawa Tengah ini harus jadi daerah yang mantep ideologi dan organisasi, mantep ideologi saja tidak cukup karena PDI-P adalah suatu organisasi politik. Jadi pertama harus menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, lalu kader Jawa Tengah tidak boleh anti simbol-simbol perjuangan PDI-P dan yang terakhir pengurus harus tertib organisasi.”³³

³³ Op.Cit. Hlm.77

Menurut Bambang Wuryanto selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, tiga poin yang menjadi misinya dalam kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2015-2020 adalah :

1. Menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan kaidah nilai-nilai perjuangan PDI-P
2. Membuat kader PDI-P bangga terhadap simbol-simbol perjuangan PDI-P
3. Menciptakan iklim tertib organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah

Jika dilihat dari visi dan misi yang dibawa oleh Bambang Wuryanto dalam kepengurusan maka iklim yang berusaha diciptakan dalam DPD PDI-P Jawa Tengah adalah iklim organisasi yang baik berlandaskan pada nilai-nilai perjuangan PDI-P. Sedangkan yang menjadi visi dan misi partai politik dalam hal ini PDI-P adalah apa yang disampaikan oleh ketua umum PDI-P.

Hambatan dalam pelaksanaan visi “Mantep Ideologi dan Mantep Organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kader dan anggota yang belum memiliki orientasi evaluatif tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi yang dimiliki adalah kognitif sehingga kader dan anggota hanya sebatas mengetahui marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Sementara itu, mantap ideologi yang dibawa oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah adalah berusaha menciptakan kondisi dimana kader dan anggota memahami betul dasar perjuangan partai, mengetahui tindakan dalam konteks materialisasi nilai-nilai perjuangan dan mengetahui konteks ruang dan waktu dalam materialisasi nilai perjuangan. Perubahan orientasi

dari kognitif ke evaluatif menjadi harapan dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan DPD PDI-P Jawa Tengah

3.3.2 Tujuan Antara DPD PDI-P Jawa Tengah

Tujuan antara berfungsi sebagai perantara atas tahapan-tahapan partai dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, tujuan jangka panjang perlu diterjemahkan ke dalam tujuan antara agar memudahkan dalam pengukuran pencapaian dari tujuan jangka Panjang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penuturan ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, dalam kepengurusannya tidak memiliki tujuan antara. Fokus ditunjukkan bagi pencapaian tujuan partai secara umum. Sedangkan untuk visi dan misi kepengurusan dijalankan sesuai dengan konsensus-konsensus yang telah ditetapkan diawal kepengurusan.

Melihat pada konsep tujuan antara maka tidak adanya tujuan antara dalam langkah gerak organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah menjadi hambatan tersendiri dalam pencapaian visi yang dibawa Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

3.3.3 Struktur Organisasi DPD PDI-P Jawa Tengah

Struktur organisasi partai politik mencerminkan beberapa hal. Pertama, struktur organisasi mencerminkan pembagian kerja dan aktivitas dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, di dalamnya aktivitas yang kompleks dibagi dalam bidang-bidang sehingga memudahkan alur kordinasi dan spesialisasi pekerjaan di

dalamnya. Kedua, struktur organisasi partai politik menjelaskan interaksi antar bidang dan manusia di dalamnya. Jalur komunikasi, sistem pelaporan, garis komando dan mekanisme pengambilan keputusan merupakan contoh mekanisme interaksi yang terjadi dalam struktur organisasi partai politik. Ketiga, struktur organisasi partai politik bercerita tentang *job description* dan *job specification*. *Job description* menggambarkan aktivitas dan aksi yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam masing-masing bidang. *Job specification* adalah menjelaskan mengenai kemampuan, *skill* dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengisi masing-masing bidang.

Keterkaitan antara aspek ideologi PDI-P dengan struktur organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah bisa dilihat dari cara mengelompokkan tugas dan pekerjaan. Selain, itu tugas dan pekerjaan yang ada dalam struktur organisasi tersebut biasanya akan mencerminkan ideologi partai politik yang bersangkutan. Adapaun komposisi struktur pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi
4. Wakil Ketua Bidang Organisasi
5. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik
7. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Keamanan
8. Wakil Ketua Bidang Maritim
9. Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

10. Wakil Ketua Bidang Ekonomi
11. Wakil Ketua Bidang Buruh
12. Wakil Ketua Bidang Tani
13. Wakil Ketua Bidang Nelayan
14. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak
15. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
16. Wakil Ketua Bidang Komunitas dan Seni Budaya
17. Wakil Ketua Bidang Pariwisata
18. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
19. Sekretaris
20. Wakil Sekretaris Bidang Internal
21. Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
22. Bendahara
23. Wakil Bendahara

Marhaenisme yang menjadi nilai ideologis PDI-P tercermin dalam pembagian tugas di bidang-bidang struktur kepengurusan. Marhaenisme sendiri secara konsep merupakan sebuah ideologi perjuangan yang mengangkat masalah penghisapan dan penindasan rakyat kecil yang terdiri dari kaum tani miskin, petani kecil, buruh miskin, pedagang kecil dan kaum melarat Indonesia lainnya yang dilakukan oleh kapitalis, tuan tanah, rentenir dan golongan-golongan penghisap lainnya³⁴. Aspek ideologi dalam struktur kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah tercermin dari adanya Bidang Buruh, Bidang Tani dan Bidang Nelayan. Namun

³⁴ Sukarno. 2005. *Di bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Yayasan Bung Karno), hlm. 253

yang menarik adalah pada keberjalanan kepengurusan bidang-bidang tersebut yang menjadi ciri ideologinya belum melakukan kerja-kerja kongkret sesuai spesifikasi bidangnya masing-masing. Para wakil ketua bidang tersebut mengedepankan kerja kolektif dan cenderung mengesampingkan *job description* dan *job specification*. Hal lain yang menjadi hambatan dalam optimalisasi kerja struktur organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia ditiap bidang, bidang-bidang yang ada hanya diisi oleh satu Wakil Ketua Bidang yang terkait tanpa anggota bidang di dalamnya. Keputusan bidang diambil oleh satu orang Wakil Ketua Bidang, sehingga tidak ada penyeimbang didalam bidang-bidang tersebut.

3.3.4 Materialisme Ideologi Politik

Ideologi politik bersifat abstrak dan konseptual, sementara permasalahan yang dihadapi masyarakat bersifat riil dan butuh penyelesaian dengan cepat. Karenanya, mengkomunikasikan ideologi politik berarti harus mampu menerjemahkan ideologi tersebut ke dalam hal-hal yang sifatnya materiil dan bisa dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami ideologi yang sifatnya kompleks, filosofis dan abstrak. Tanpa wujud riil dari ideologi maka ideologi tersebut hanya akan menghadirkan kebingunan dan membuka interpretasi yang beragam di masyarakat. Dengan demikian, materialisme ideologi partai politik menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan, adapun beberapa hal yang

bisa dilakukan dalam materialisme ideologi politik adalah yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. *Platform Partai*

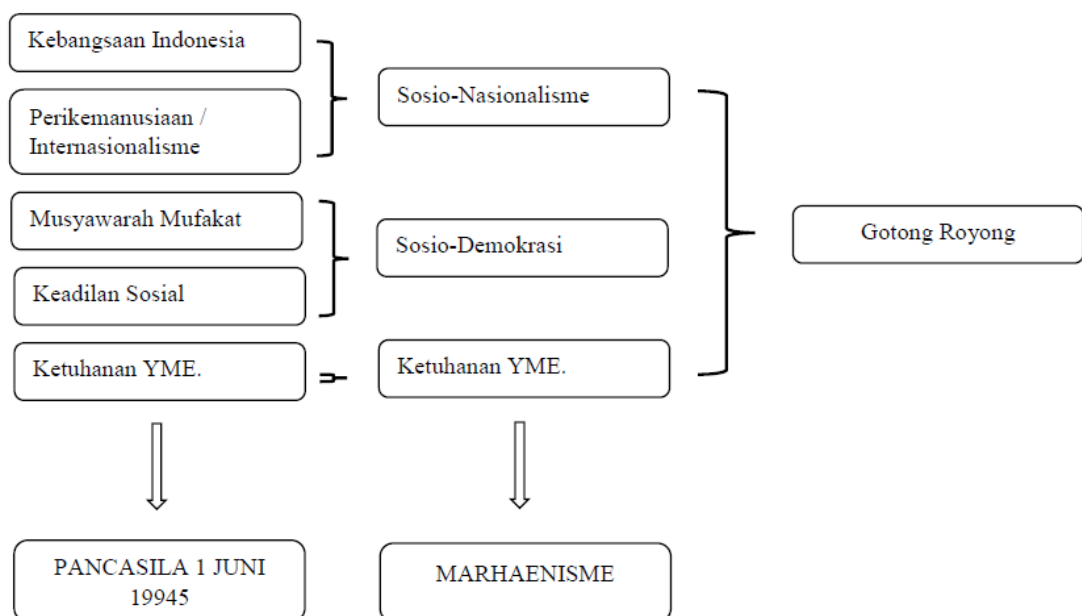
Platform partai menjadi salah satu bentuk materialisme ideologi politik, *platform* partai sendiri berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dalam koridor bangsa dan negara. *Platform* partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan hal-hal yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti program kerja maupun isu politik. Di dalamnya seluruh sistem nilai dan norma diterjemahkan dan menjadi landasan bagi penyusunan hal-hal yang bersifat kongkret. *Platform* partai juga bisa dilihat sebagai *spirit* dari partai politiknya. Selain itu, *platform* partai juga berisikan komitmen partai politik dalam menjalankan roda organisasi serta apa yang ingin dikontribusikan pada masyarakat. *Platform* partai juga berisikan hal-hal yang sifatnya fundamental dan menjadi prioritas perjuangan politik.

PDI-P memiliki tujuan yakni mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai NKRI yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara eksplisit yang menjadi asas PDI-P adalah Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Singkatnya secara tertulis Pancasila 1 Juni 1945 menjadi asas PDI-P. Adapun nilai yang menjiwai asas tersebut akan penulis jelaskan dalam skema gambar di bawah ini.

Gambar 3.2

Asas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)



Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang secara tertulis dijadikan asas perjuangan oleh PDI-P adalah rumusan sila dari Sukarno. Hal tersebut senada dengan komitmen PDI-P untuk selalu membumikan ajaran Sukarno sebagai *Founding Father*. Adapun intisari dari gambar mengenai ideologi PDI-P di atas adalah sesuai dengan apa yang di sampaikan Sukarno di forum sidang *Dokutitsu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

“...Dasar-dasar negara telah Saya usulkan. Lima bilanganya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik, simbolik angka pula. Rukun islam lima jumlahnya, jari kita lima setangan, kita mempunyai panca indera. Apa lagi yang lima bilanganya? (seorang yang hadir menjawab : Pandawa Lima)

Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilanganya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli Bahasa Namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Bilangan lima itu Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada Saya. Saudara-saudara bertanya pada Saya, apakah perasan yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah Saya fikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, *Weltanschauung* kita.

Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, Saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu Saya namakan *Socio-Nationalism*. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke* dengan kesejahteraan, Saya peraskan pula menjadi satu : inilah yang dulu Saya namakan *Socio-Democratie*. Tinggal lagi Ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga : *Socio-Nationalism*, *Socio-Democratie* dan Ketuhanan. Kalau Tuan suka dengan simbolik tiga maka ambilah yang tiga ini. Tetapi bila semua tuan-tuan tidak senang dengan Trisila ini, dan minta satu, satu dasarnya saja? Baiklah. Saya jadikan satu, Saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Yaitu Gotong Royong.”³⁵

Jadi, konsep sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan lebih dulu lahir dari konsep Pancasila 1 Juni 1945. Tiga butir tersebut yang dinamakan dengan Trisila merupakan inti dari Marhaenisme yang digagas oleh Sukarno. Kedudukan marhaenisme dalam perjuangan PDI-P menjadi sangat vital, karena konsep tersebut merupakan inti dari asas Pancasila 1

³⁵ Pidato Sukarno dalam Forum BPUPKI, Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

Juni 1945. Asas tersebut bersifat fundamental dan menjadi *spirit* perjuangan politik maka secara jelas *platform* PDI-P tertuang dalam ikhtisar marhaenisme seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal yang perlu difahami adalah bahwasanya ideologi partai politik yang tercermin dalam *platform* partai bukanlah aksesoris organisasi semata, tetapi perlu diejawantahkan dalam kegiatan fisik sehari-hari. Perilaku para politisi partai politikpun idealnya perlu mengacu pada *platform* partai yang telah disepakati bersama.

Menurut Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jawa Tengah, bentuk tindakan politis partai dalam pencapaian kekuasaan melalui jalan Konstitusional dan Demokratis, jalan tersebut merupakan bentuk praksis dari ideologi PDI-P sendiri.

“Para kader maupun anggota PDI-P di Jawa Tengah itu harus faham kalau pencapaian kekuasaan itu harus lewat jalan konstitusional dan demokratis. Karena itulah wujud kongkret dari ideologi sebagai alat perjuangan partai. Apalagi ketua DPD yang sekarang sangat mengedepankan aspek ideologi dalam kerja organisasi jadi tidak bisa asal babad alas dalam pencapaian kekuasaan. Meskipun dua jalan itu susah dan butuh perjuangan ekstra namun itulah yang seharusnya dilakukan PDI-P khususnya PDI-P Jawa Tengah.”³⁶

Pencapaian kekuasaan melalui jalan konstitusional yang dimaksud adalah bahwasanya PDI-P Jawa Tengah dalam usaha pencapaian kekuasaannya menempuh jalan-jalan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia dengan tentunya dengan mengacu aturan hokum tertinggi

³⁶ Op.Cit. Hlm.92

yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalan demokratis yakni sifatnya demokrasi dimana persamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan dalam masyarakat menjadi *value* yang dikedepankan.

2. Isu Politik

Isu politik adalah berbeda dari *platform* politik, isu politik ini berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Isu politik merupakan topik dan bahasan yang mencerminkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah partai politik harus terus menerus memperbarui data dan informasi tentang kondisi yang tengah dihadapi masyarakat. Dalam hal ini kekusaran, keresahan maupun kekecewaan akan suatu hal harus mampu ditangkap oleh partai politik untuk kemudian dituangkan dalam isu politik.

Struktur pengurus PDI-P Jawa Tengah memiliki bidang yang terbilang lengkap dari beberapa aspek dan dapat menggambarkan platform perjuangan dari partai itu sendiri. Namun bidang-bidang yang ada rata-rata tidak mempertimbangkan apa yang menjadi TUPOKSI nya serta cenderung mengesampingkan kerja-kerja struktural dan fungsional. Identifikasi permasalahan masyarakat diberbagai aspek untuk kemudian dijadikan isu politik kurang maksimal lantaran aspek ideologi dan aspek organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Strategi Partai

Strategi partai dibutuhkan guna pencapaian tujuan jangka Panjang maupun jangka menengah dengan efektif. Strategi partai sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu :

- a. Strategi terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini dinilai penting dilakukan guna pemenangan kandidat dan partai politik yang bersangkutan. Melalui pemenangan suara, kandidat maupun partai politik dapat mengarahkan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan garis *platform* perjuangan partai.
- b. Strategi politik untuk berkoalisi dengan partai politik lain, cara ini dimungkinkan sejauh partai yang akan diajak berkoalisi konsisten dengan ideologi partai politik yang mengajak berkoalisi dan tidak hanya mengejar tujuan praktis memenangkan Pemilu semata.
- c. Strategi politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi partai politik secara keseluruhan mulai dari strategi penggalangan dana partai, pemberdayaan anggota dan kaderisasi, penyempurnaan rekrutmen dan lain sebagainya.
- d. Strategi umum, berkaitan dengan upaya partai untuk bisa terus menerus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kemajuan zaman.

Dari berbagai strategi yang disebutkan di atas, PDI-P Jawa Tengah menurut Ketua DPD nya berfokus pada strategi umum karena merasa masih sulit untuk menyesuaikan ideologi dengan konteks ruang dan waktu yang

ada serta fokus pada pemberdayaan anggota dan kaderisasi. Selebihkan PDI-P Jawa Tengah mengikuti strategi yang telah dirumuskan oleh pusat.

4. Kebijakan Partai

Ideologi politik sejatinya akan tercermin dari kebijakan partai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. *Platform* partai menjadi tolok ukur yang penting dalam implementasi ideologi politik yang dimiliki partai. Cara partai politik dalam melihat, menganalisa dan mengajukan solusi atas permasalahan bangsa akan mencerminkan ideologi yang dianutnya.

“...Jawa Tengah menerapkan kebijakan internal untuk bangga menggunakan simbol-simbol PDI-P, jadi setiap ada agenda harus memakai PDH lengkap dengan identitas nama dan logo banteng. Terdapat *reward* dan *punishment* bagi setiap kader maupun anggota nantinya”³⁷

PDI-P Jawa Tengah lebih banyak berfokus pada kebijakan internal DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi lantaran kebijakan partai secara umum sepenuhnya menjadi urusan pusat dan mengikat struktural dibawahnya sampai pada anak ranting partai. Kebijakan internal yang ada difokuskan pada aspek tertib organisasi dan sebagai usaha mencetak kader-kader militan yang mempunyai rasa bangga terhadap PDI-P itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara garis besar hambatan dalam materialisasi ideologi politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah melalui *platform*, isu politik, strategi dan kebijakan partai adalah pola pikir pengurus DPD

³⁷ Op.Cit. Hlm.77

PDI-P yang mengedepankan kerja kolektif. Akibat dari pola pikir tersebut adalah kerja fungsional sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada tidak berjalan.

Hal tersebut tidak terlepas dari orientasi kognitif yang lebih banyak berperan dalam menggambarkan pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. realitas yang terjadi bahwasanya pemahaman kader dan anggota tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya dalam tataran informatif belum pada kesadaran diri tentang nilai marhaenisme dalam tindakan.

Selain itu pragmatisme politik yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah membuat suasana semakin menjauh dari wacana ideologi. Dasar perjuangan yang dianggap abstrak, sulit dicerna dan sulit diimplementasikan membuat kader dan anggota hanya berkuat pada hal-hal yang bersifat riil. Terlebih jika harus disandingkan dengan realitas terjebakanya para kader dan anggota dalam pemahaman semu yang mengaitkan ideologi dengan sifat fanatik serta otoriter. Semakin tinggi tekanan dalam persaingan politik membuat kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah yang terlibat di dalamnya hanya berorientasi pada cara-cara untuk mendapatkan suara dalam Pemilu, sementara permasalahan masyarakat jarang dibahas dan tidak terselesaikan.

3.4 Tantangan Penerapan Marhaenisme dalam Kerja Organisasi Partai Politik di DPD PDI-P Jawa Tengah

3.4.1 Tantangan dari Dalam

Kemampuan kader maupun anggota PDI-P Jawa Tengah dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan ideologis yang sesuai dengan perkembangan zaman masih sangat minim, usaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut sangat tinggi melalui Pendidikan dan pelatihan ideologi namun terhambat lantaran keterbatasan dana dalam pelaksanaannya.

Anggota maupun kader PDI-P Jawa Tengah baik yang ada di jabatan pemerintahan maupun yang tidak, rata-rata hanya memahami apa yang menjadi instruksi ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa memahami secara mendalam konteks ideologi yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diperjuangkan. Sehingga usaha dalam mematerialisasikan ideologi partai ke dalam kebijakan pemerintahan Jawa Tengah perlu proses yang lebih dalam. Karena partai harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pemahaman anggota fraksi yang minim dalam aspek ideologi dan mereka cenderung hanya berfokus pada pragmatisme politik.

3.4.2 Tantangan dari Luar

Menurut penjelasan dari ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cepat merupakan tantangan tersendiri bagi partai. tantangan datang ketika usaha untuk mematerialkan ideologi harus selalu

diupayakan agar sesuai konteks ruang dan waktu yang ada. Sementara itu para kader dan anggota bahkan belum selesai dalam memahami ideologi partai dalam hal konseptual sehingga usaha pencapaian cita-cita perjuangan dinilai semakin berat dan membutuhkan usaha lebih.

Ideologi yang baik adalah ideologi yang berperan dalam kemajuan bangsa dan negara. Ideologi partai politik dalam hal ini marhaenisme dalam penerapannya di DPD PDI-P Jawa Tengah harus diterima dan difahami oleh kader dan anggota yang ada di dalamnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah” berangkat dari permasalahan penerapan ideologi partai politik, secara khusus menganalisa tentang penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah serta meninjau pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual mengenai ideologi marhaenisme, orientasi ideologi dan elemen penyusun ideologi partai politik.

Berdasarkan pada proses penelitian, penyajian data dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai marhaenisme terdapat dalam setiap fungsi partai politik yang dijalankan oleh DPD PDI-P Jawa Tengah, meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Tinjauan melalui komunikasi politik yang dilakukan di DPD PDI-P Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dalam menjalankan fungsi aspirasi, agregasi dan artikulasi, hal yang berkaitan dengan kepentingan *wong cilik* menempati skala prioritas pertama untuk kemudian diperjuangkan kader dan anggota yang duduk di parlemen Jawa Tengah sebagai suatu bentuk usaha materialisasi ideologi. Konsep tersebut juga diterapkan dalam hal

pengaturan konflik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah. Proses sosialisasi politik yang dilakukan DPD PDI-P Jawa Tengah fokus pada upaya penanaman nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan partai, masif dilakukan dalam Komunitas Juang Jawa Tengah sebagai sayap partai. Rekrutmen internal yang dilakukan DPD PDI-P Jawa Tengah dalam pemilihan ketua mengedepankan musyawarah mufakat disetiap pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagai upaya penerapan nilai marhaenisme dalam prinsip sosio-demokrasi.

2. Orientasi kognitif banyak berperan dalam menggambarkan realitas pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Orientasi kognitif tersebut berkaitan dengan pengetahuan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi tersebut bersifat pemahaman informatif belum pada tahap pelibatan perasaan dan kombinasi nilai marhaenisme dalam tindakan. Akibatnya, materialisasi nilai marhaenisme yang telah terkonsep dalam fungsi partai politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan.
3. Hambatan dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kurangnya pemahaman kader dan anggota tentang marhaenisme baik secara konseptual maupun praksis. Hal tersebut merupakan efek dari orientasi ideologi yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah.
4. Tantangan dalam penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang sangat pesat.

Kondisi tersebut membuat DPD PDI-P Jawa Tengah harus selalu melakukan penyesuaian dalam penerapan marhaenisme agar sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Selain itu, DPD PDI-P Jawa Tengah juga dituntut oleh kemajuan zaman yang ada agar memiliki konsistensi dalam menerjemahkan dasar perjuangan dengan menggunakan perangkat analisis yang tajam.

4.2 Saran

Berdasarkan penyajian data, pembahasan serta kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian dengan judul Studi Orientasi Marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah ini maka terdapat saran yang penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman kader dan anggota melalui kaderisasi berkesinambungan

Selama ini kaderisasi yang dilakukan dalam DPD PDI-P Jawa Tengah sebatas terprogram dan berjenjang, diantaranya melalui kursus kader. Hal yang perlu difahami bahwasanya kaderisasi tidak cukup dalam konsep terprogram dan berjenjang, harus adanya kaderisasi berkesinambungan. Tujuannya adalah bahwa setelah penanaman nilai dapat dilakukan pada kader dan anggota maka perlu adanya pengembangan jaringan kerja ke komponen-komponen masyarakat agar lebih mendekatkan diri terutama pada *wong cilik*. Kaderisasi berkesinambungan menugaskan para kadernya untuk ditempatkan dalam jaringan kemasyarakatan yang

dibangun sebagai cara dan pola rekrutmen untuk melahirkan para pemimpin partai yang berkualitas dan berpihak pada rakyat kecil. Maka para aktivis partai yang sudah mengikuti Pendidikan kader harus memiliki pengalaman lebih bersama masyarakat, sebagai contoh melalui organisasi pemuda, petani, buruh dan lain sebagainya sebelum diajukan partai untuk penugasan di Lembaga eksekutif maupun legislatif.

2. Alokasi dana untuk proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi

Perlu adanya peningkatan alokasi dana bagi proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi partai agar proses tersebut lebih bisa dimaksimalkan. Dalam hal ini DPD PDI-P Jawa Tengah harus lebih mengaktifkan iuran pengurus agar memiliki keterikatan tanggungjawabnya kepada partai terutama pada kader dan anggota di Jawa Tengah serta agar tidak selalu mengandalkan dana dari kalangan atas.

3. Materialisme ideologi sesuai konteks ruang dan waktu

Kondisi di luar partai seperti perubahan dalam masyarakat, kemajuan teknologi maupun globalisasi mengharuskan DPD PDI-P Jawa Tengah menempuh langkah-langkah adaptasi dengan cepat. Mengingat bahwa dunia politik tidak terbatas pada Pemilu, parlemen ataupun kekuasaan semata. Tetapi perlu juga diperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, Pendidikan, kesejahteraan sosial serta teknologi agar partai politik dapat masuk ke ruang-ruang berbangsa dan

bernegara dengan optimal. Maka dari itu ideologi partai politik harus mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan zaman yang ada. Atribut-atribut ideologi partai politik seperti kebijakan, strategi partai, isu politik, budaya organisasi dan lain sebagainya dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam masyarakat agar penyelesaian masalah yang ada menjadi tepat dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Adams, C. (2014). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, I. (2006). *Sistem Politik Ideologi dan Demokrasi di Indonesia*.
- Kaligis, R. A. (2014). *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDIP*. Tangerang: Margin Kiri.
- Mintz, J. S. (2003). *Muhammad, Marx, Marhaen : Akar Sosialisme Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukarno. (2005). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Sukarno, I. (2017). *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sukarno, I. (2015). *Nasionalisme Islamisme Marxisme*. Bandung: Segi Arsy.
- Sukarno, I. (2014). *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tengah, D. P. (2015). *Piagam Perjuangan, AD/ART PDIP*. Jakarta: DPP PDIP.
- Wibowo, Y. S. (2005). *Marhaenisme Ideologi Perjuangan Sukarno*. Yogyakarta: Buana Pustaka.

Gabriel A Almond dan Sidney Verba. (1984). *BUDAYA POLITIK: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terj. Drs. Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.

Daradjati. (2014). *Mr.Sartono : Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Firmanzah. (2018). *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka obor Indonesia.

Rocamora, Eliseo. (1991). *Nasionalisme mencari Ideologi*. Jakarta : Pustaka Tama Grafiti.

Puspoyo, Widjanarko. (2012). *Dari Sukarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009*. Solo. Era Adicitra Intermedia

Sumber Penelitian dan Jurnal:

Multizami H. (2016). Persepsi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Semarang Terhadap Marhaenisme Sebagai Ideologi Perjuangan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro

Ardila Fitriani dan Sri Budi Eko Wardani. (2013). Fungsi Ideologi dalam Partai Politik, Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Perumusan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2010-2011. *Laporan Penelitian*. Universitas Indoensia.

Fuad Abdullah. (2015). Fusi Partai-partai Islam Menjadi PPP Pada Masa Orde Baru (1971-1973). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kuswono. (2016). MARHAENISM: SOCIAL IDEOLOGY CREATE BY SUKARNO. *Jurnal HISTORIA Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016, ISSN 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728) , 119-130.*

Hasil Wawancara:

Ir. Bambang Wuryanto, MBA. (Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Periode 2015-2020). Pada Jumat, 5 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB. Bertempat di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah.

Bambang Hariyanto Baharudin. (Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jawa Tengah dan plt. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah). Pada Senin, 10 September 2018 Pukul 11.00 WIB. Bertempat di Kantor Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah.

Sarei Abdul Rosyid. (Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah). Pada Senin, 24 September 2018 Pukul 10.45 WIB. Bertempat di Ruang Komisi D DPRD Jawa Tengah.

Harry Fadhilah. (BADIKLATDA DPD PDI-P Jawa Tengah). Pada Jumat, 5 Oktober 2018 Pukul 19.00 WIB. Bertempat di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah.

Sumber Internet:

Struktur Pengurus DPP PDI-P Periode 2015-2020. (2015). Dalam <http://www.pdiperjuangan.id/>. Diunduh pada tanggal 30 Oktober 2017.

Hasil Pemilu tahun 2014. (2014). Dalam <http://www.kpu.go.id>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2018.

Gambaran umum Jawa Tengah. (2015). Dalam <http://simreg.bappenas.go.id>. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2018.

Hasil Pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014. (2014). Dalam <http://www.jateng.kpu.go.id>. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2018.